

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA  
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
AISYAH AULIYA AZZAHRA  
17.833.0039**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/6/23

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA  
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
AISYAH AULIYA AZZAHRA  
17.833.0039**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)26/6/23

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA  
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH :**

**AISYAH AULIYA AZ-ZAHRA  
17.833.0039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Aisyah Auliya Az-Zahra

NPM : 178330039

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing

(Dr. Hj. Sari Brian Tambunan, SE, M.MA)


(Linda Lopes, SE, M.Si)

Pembimbing

Pembimbing

Mengetahui :

  
(Ahmad Istikom, BBA/Trens), MMgt, PhD, CIMA)  
Dekan

  
(Fauziah Rahman, Spd, M.aK)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 14 April 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/6/23

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*", yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 April 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Aisyah Auliya Az-Zahra**  
**NPM: 17.833.0039**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Auliya Az-Zahra  
NPM : 178330039  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberi kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Utara", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

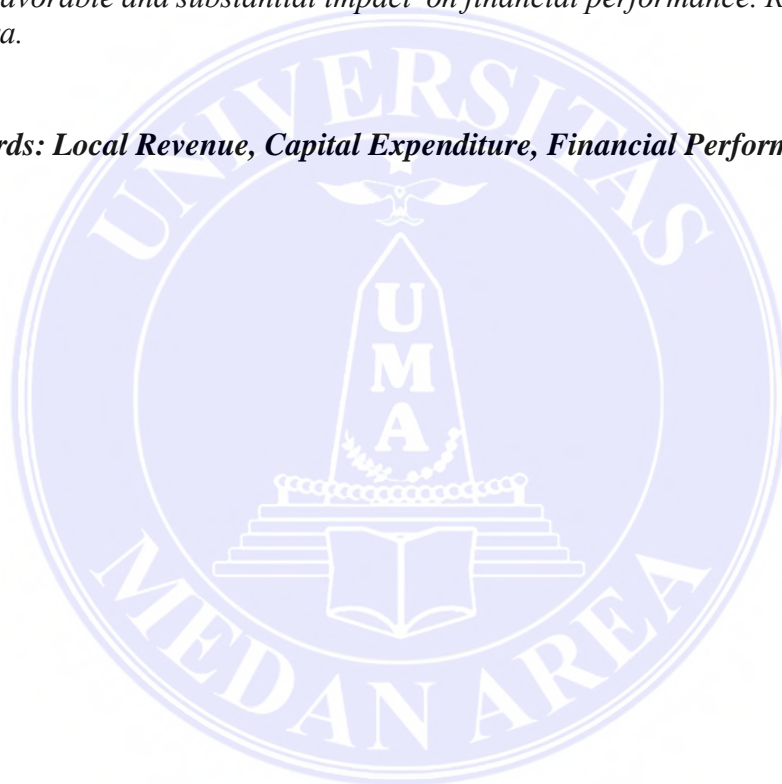
Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 14 April 2023  
Yang Menyatakan,

  
Aisyah Auliya Az-Zahra  
NPM. 17.833.0039

## ABSTRACT

*This study's goal was to ascertain the impact of regional initial revenue and capital spending on the financial performance at the department of food products and gardening in the province of North Sumatra. Research of this kind is quantifiable. Secondary data was used as the study's data source. This method of gathering data is for a paperwork research. The population used in this research is entirely based on budget fulfillment reports from the North Sumatra province's department of food products and agriculture. The Budget Reality Report for 2015–2021 serves as the study group. Quantitative statistics are the sort of data used in this study. Multiple linear regression using the SPSS software is the data processing method used. The findings demonstrated that local original revenue and capital spending, as well as combined local original and capital Agriculture and Gardening Service, had a partly favorable and substantial impact on financial performance. Region of North Sumatra.*

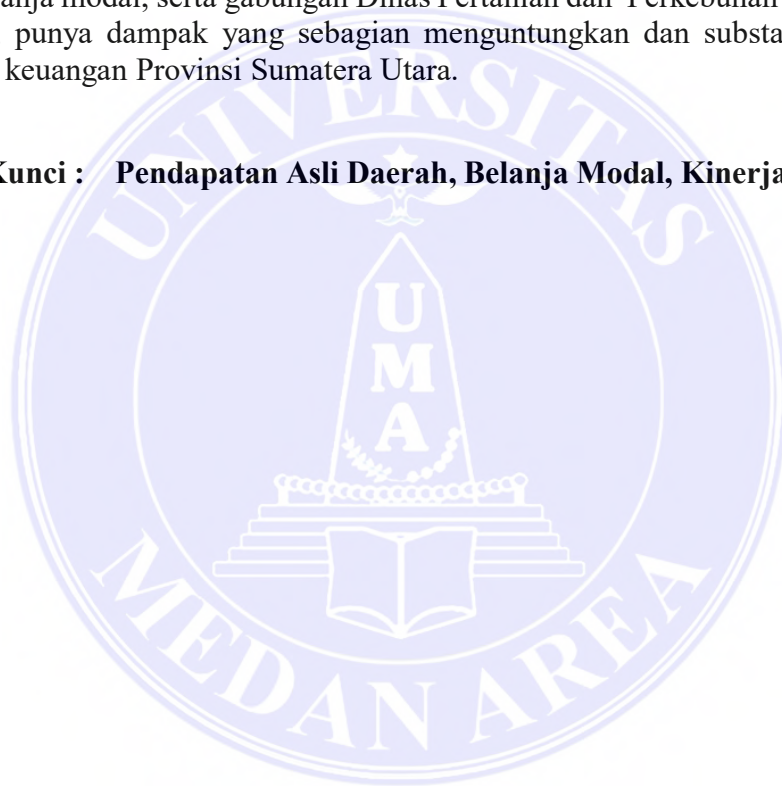
**Keywords: Local Revenue, Capital Expenditure, Financial Performance.**



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perkebunan dan Pangan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian semacam ini dapat diukur. Data sekunder dipakai sebagai sumber data penelitian. Metode pengumpulan data ini ialah untuk penelitian dokumen. Populasi yang dipakai pada penelitian ini seluruhnya dari laporan pemenuhan anggaran dari Dinas Produk Pangan dan Pertanian Provinsi Sumatera Utara. Laporan Realitas Anggaran 2015–2021 berfungsi sebagai kelompok studi. Statistik kuantitatif ialah jenis data yang dipakai pada penelitian ini. Regresi linear berganda dengan memakai software SPSS yaitu metode pengolahan data yang dipakai. Temuan menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal, serta gabungan Dinas Pertanian dan Perkebunan asli dan modal daerah, punya dampak yang sebagian menguntungkan dan substansial terhadap kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Kinerja Keuangan.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Aisyah Auliya Az-Zahra
NPM	178330039
Tempat, Tanggal Lahir	Jl. Bunga Wijaya Kesuma XXIII Pasar 4 Pd. Bulan Selayang II
Nama Orang Tua :	
Ayah	Muhammd Ridwan, SE
Ibu	Diti Sepnitasari, A.Md
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP NAMIRA ISLAMIC SCHOOL
SMA/SMK	SMA ASY-SYAFI'YAH
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	-
NO. HP/WA	081275782405
E-mail	<a href="mailto:aisyah212000@gmail.com">aisyah212000@gmail.com</a>

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian ada shalawat dan salam kiranya melimpah di pangkuan Rasulullah, Nabi, dan keluarganya, sahabat terdekat, serta orang-orang yang masih mengikuti ajarannya. Aamiin.

Peneliti dapat menuntaskan tugas penulisan skripsi untuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara”**.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta atas dukungan dan bantuannya dalam menuntaskan skripsi ini. Ibu Diti Sepnitasari dan ayah Muhammad Ridwan. Saya dengan tulus menghargai doa, cinta, perhatian, fokus, inspirasi, dan dukungan yang sudah Anda berikan. Peneliti tidak bisa seperti ini tanpanya.

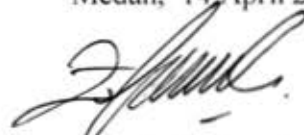
1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak
4. Ibu Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, M.MA selaku dosen pembimbing atas kebaikan dan kesabarannya selama membimbing dan memberi kepercayaan dan semangat kepada peneliti selama mengerjakan tugas

akhir.

5. Ibu Linda Lores, SE, M.Si selaku dosen penguji, sebab sudah membantu dan sabar selama membimbing, dan sudah memberi kepercayaan dan dorongan kepada peneliti selama mereka bekerja untuk menuntaskan tugasakhir.
6. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE,Ak, M.Acc selaku sekretaris. Peneliti sangat menghargai kesediaan ibu dan rekomendasinya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini dan sudah memberi bimbingan dan inspirasi kepada peneliti.
8. Seluruh Staff Universitas Medan Area atas segala dukungan peneliti.
9. Pimpinan dan staff pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hoertikultura Provinsi Sumatera Utara.
10. Seluruh keluarga yang sudah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis saat penulisan skripsi sampai selesai.
11. Teman-teman seperjalanan serta seperjuangan Akuntansi stambuk 2017.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya hingga selesainya skripsi ini.

Di akhir penelitian, peneliti sadar bahwa masih banyak permasalahan di penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti mendapatkan kritik dan saran yang bermanfaat, serta dukungan yang sangat membantu.

Medan, 14 April 2023

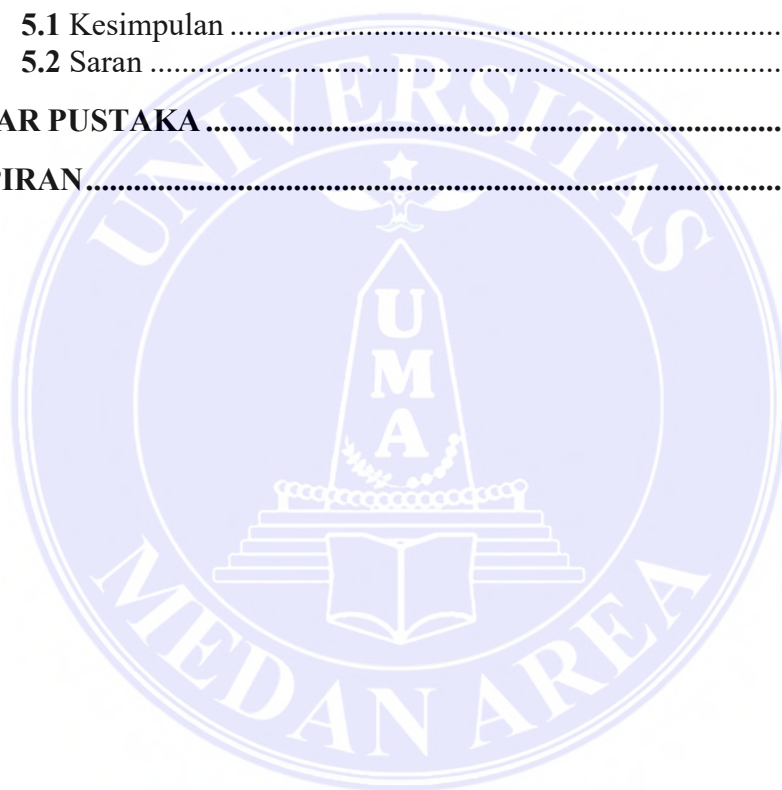


Aisyah Auliya Azzahra  
NPM : 178330039

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>8</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>9</b>
1.4 Manfaat Penelitian .....	<b>9</b>
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah .....	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah .....	<b>11</b>
2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah.....	<b>13</b>
2.1.3 Rasio-Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah.....	<b>14</b>
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	<b>17</b>
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	<b>17</b>
2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	<b>19</b>
2.2.3 Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .....	<b>24</b>
2.3 Belanja Modal.....	<b>25</b>
2.3.1 Pengertian Belanja Modal.....	<b>25</b>
2.3.2 Macam-Macam Belanja Modal.....	<b>27</b>
2.4 Penelitian Terdahulu .....	<b>30</b>
2.5 Kerangka Konseptual.....	<b>33</b>
2.6 Hipotesis Penelitian.....	<b>34</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	<b>38</b>
3.1.1 Jenis Penelitian.....	<b>38</b>
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	<b>38</b>
3.1.3 Waktu Penelitian .....	<b>38</b>
3.2 Populasi dan Sampel .....	<b>39</b>
3.2.1 Populasi Penelitian.....	<b>39</b>
3.2.2 Sampel Penelitian.....	<b>39</b>
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	<b>40</b>
3.3.1 Jenis Data .....	<b>40</b>
3.3.2 Sumber Data.....	<b>40</b>
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	<b>41</b>
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	<b>42</b>

3.6 Teknik Analisa Data .....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	46
4.1.1 Sejarah Umum Dinas TPH Provinsi Sumatera Utara .....	46
4.1.2 Visi dan Misi Dinas TPH Provinsi Sumatera Utara.....	49
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas TPH Provinsi Sumatera Utara.....	49
4.2 Hasil Penelitian .....	50
4.2.1 Statistik Deskripsi .....	50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	56
4.2.4 Uji Hipotesis .....	57
4.3 Pembahasan.....	60
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : PAD dan Belanja Modal Tahun 2015-2021 .....	4
Tabel 1.2 : Ringkasan Perubahan APBD Provinsi SUMUT 2020 .....	6
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian .....	39
Tabel 3.2 : Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 4.1 : Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.2 : Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	53
Tabel 4.3 : Uji Multikolinearitas .....	54
Tabel 4.4 : Uji Autokorelasi .....	56
Tabel 4.5 : Uji Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4.6 : Uji t (Parsial).....	58
Tabel 4.7 : Uji F (Simultan) .....	59
Tabel 4.8 : Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi .....	49
Gambar 4.2 : Histogram .....	51
Gambar 4.3 : Normalitas Grafik <i>P-Plot</i> .....	52
Gambar 4.4 : Grafik <i>Scatterplot</i> .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran.....	75
Lampiran 2 : Output SPSS.....	107
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....	111
Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Penelitian .....	112





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah memiliki tujuan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah diberi kekuasaan guna melindungi kepentingan daerahnya sebab pemerintah pusat saat ini tidak dapat mengawasi pertumbuhan daerah secara menyeluruh. Strategi kedaulatan daerah harus diberlakukan sebagai hasilnya. Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mengacu pada kemampuan daerah untuk menguasai dan menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan serta kemasyarakatan pada struktur NKRI.

Pemerintah daerah wajib secara mandiri mengelola dana daerah hingga pertumbuhan daerah bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu pembiayaan pemerintah pusat. Keberhasilan keuangan Pemerintah daerah yang kuat tercermin dari kemampuan daerah untuk mengelola dananya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah yang bisa dipakai untuk menetapkan aturan pembangunan daerah bagi Pemda dapat mewakili Pengelolaan Keuangan Daerah khusus. Akibatnya, APBD sering disebut sebagai instrumen untuk menilai seberapa baik kinerja Pemda saat melaksanakan pembangunan daerah serta bertanggung jawab untuk memajukan kepentingan juga kesejahteraan rakyatnya. Menurut Abdullah (2015), kemampuan daerah guna menemukan serta menangani sumber daya keuangan daerah untuk mencukupi kebutuhan mereka tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat ialah arti dari keberhasilan keuangan Pemda.

Agar dapat dengan bebas memakai dana itu untuk keuntungan lingkungan sekitar dalam batas-batas yang ditetapkan oleh aturan perundang- undangannya. Tujuan pembangunan daerah ialah guna meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat. Pemda diberi kekuasaan untuk Keberhasilan keuangan pemerintah kota dipengaruhi oleh sejumlah variabel, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal. Menurut studi Hasna (2019), pendapatan awal daerah serta belanja modal punya dampak menguntungkan dan substansial pada keberhasilan keuangan Pemda.

Apabila daerah mengelola kemampuannya sendiri untuk menghasilkan bentuk-bentuk uang yang berasal dari daerahnya sendiri, seperti pendapatan asli daerah, maka keberhasilan keuangan Pemda bisa memuaskan. Tingkat kebebasan sebuah daerah dalam mendanai inisiatif pembangunannya sendiri, operasi pemerintah, dan layanan masyarakat akan ditunjukkan oleh pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian, ditentukan bahwa kinerja keuangan suatudaerah akan lebih baik apabila pendapatan asli daerahnya lebih tinggi dari pendapatan lainnya.

Ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kapasitas mereka terbatas untuk mengeksplorasi kemungkinan aliran pendapatan ialah dua masalah keuangan daerah yang dialami Pemda di Indonesia. Uang itu berasal dari dana produksi lokal. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda ialah uang yang didapatkan daerah dengan cara dikenakan pajak dari pada aturan perundang-undangan daerahnya.

Retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya adalah sumber penghasilan asli daerah yang potensial.

Pemda punya lebih banyak kebebasan untuk memakai pendapatan asli daerah daripada uang yang asalnya dari sumber luar, yang mewakili kemandirian suatu daerah. Guna meningkatkan anggaran daerah, Pemda harus berupaya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah berkembang mungkin yaitu tanda kesehatan keuangan yang sehat. Selain itu, pendapatan dapat mewakili sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mendukung operasinya.

Pemda juga sudah melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan keberhasilan keuangan mereka melalui proyek belanja modal. Pembangunan infrastruktur dan upaya belanja modal lainnya berkontribusi pada terciptanya aliran pendapatan daerah. Belanja modal pemerintah, menurut Ayinde (2015), ialah biaya dari pemerintah untuk inisiatif khusus guna tingkatkan serta mendukung kenyamanan dan kemudahan hidup bagi rakyatnya dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari satu tahun.

Pemda menciptakan infrastruktur berupa fasilitas umum, seperti jalan, struktur, penyediaan angkutan umum, dan sebagainya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan meningkatkan kesehatan dan hasil lingkungan. Cara berbagai jenis pengeluaran pemerintah mempengaruhi pembangunan ekonomi pada akhirnya ditentukan oleh output ini. Juga, belanja modal bisa mendorong investasi yang akan mempengaruhi perkembangan pendapatan daerah kedepannya.

Meningkatnya pembangunan pendapatan daerah yaitu salah satu tanda keberhasilan keuangan Pemda. Kinerja keuangan bisa dilihat dari peningkatan pendapatan daerah dan efektifitas belanja daerah sebab kinerja keuangan yakni tolok ukur keberhasilan unsur keuangan, termasuk pendapatan dan belanja daerah (Lucky, 2013).

Satu set ukuran keuangan termasuk rasio independensi, rasio efektivitas serta efisiensi, rasio aktivitas, rasio cakupan layanan utang (DSCR), juga rasio pertumbuhan dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan keuangan pemerintah daerah. Rasio pertumbuhan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah karena dianggap dapat mengukur seberapa besar pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu. (Halim, 2002). Kesehatan keuangan Pemda ditunjukkan dengan persentase perkembangan nilai yang menguntungkan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih besar. Jumlah pendapatan asli daerah dan belanja modal Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemprov Sumatera Utara tahun 2017 hingga tahun 2020 ialah:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal**  
**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2015-2021**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
1.	2015	Rp 1.996.284.127	Rp 44.507.043.551
2.	2016	Rp 3.624.512.635	Rp 31.331.348.968
3.	2017	Rp 3.661.856.933	Rp 17.484.875.254
4.	2018	Rp 3.739.145.551	Rp 22.702.805.379
5.	2019	Rp 3.861.392.093	Rp 24.741.764.233
6.	2020	Rp 4.193.969.182	Rp 27.353.327.008
7.	2021	Rp 5.011.717.158	Rp 31.685.557.312

*Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara*

Dari tabel diatas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara merasakan peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa dari tahun 2015 hingga 2021 Pendapatan Asli Daerah merasakan peningkatan signifikan, dan sekaligus sebagai angka puncak tertinggi pada tahun 2021 yakni sejumlah Rp 5.011.717.158, dan pada tahun 2015 ialah angka paling kecil dari Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 1.996.284.127. Selanjutnya pada Belanja Modal di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara juga merasakan peningkatan setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2015 hingga 2021 Belanja Modal Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara merasakan puncak tertinggi pada tahun 2015 yakni sejumlah Rp 44.507.043.551. tetapi tahun selanjutnya 2017 merasakan penurunan yakni menjadi Rp 17.484.875.254.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara merasakan penurunan secara menyeluruh, terutama pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara merasakan penurunan yang menekan sebagian besar pertumbuhan usaha. Hingga hal ini juga menyebabkan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, terhambatnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor UKM dan UMKM serta pariwisata yang berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Hingga dari dampak itu kinerja keuangan daerah juga ikut terganggu dan merasakan penurunan. Menurunnya APBD dan belanja modal bisa diketahui dari Laporan Perubahan APBD Pada Dinas Tanaman dan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 :

**Tabel 1.2**  
**Ringkasan Laporan Perubahan APBD Pada Dinas Tanaman dan Pangan**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
<b>Pendapatan Daerah</b>	7,555,311,173	6,963,875,464	-734,042,947
Pendapatan Asli Daerah	4,506,846,602	4,199,643,671	-307,202,931
Dana Perimbangan	2,497,595,875	2,258,547,657	-239,048,218
Lain-Lain Pend. Daerah Yang Sah	550,868,696	505,684,136	-45,184,560
<b>Belanja Langsung</b>	40,679,820,127	29,543,017,256	-11,136,802,871
Belanja Pegawai	1,804,844,758	1,004,619,536	-800,225,222
Belanja Barang dan Jasa	9,937,595,875	1,123,112,765	-8,814,483,110
Belanja Modal	28,937,379,494	27,415,284,955	-1,522,094,539

Sumber : Laporan Perubahan APBD Pada Dinas Tanaman dan Pangan Tahun 2020

Dari tabel diatas menjelaskan sebagian besar komponen laporan realisasi anggaran merasakan perubahan yakni penurunan. pada tahun 2020 terjadinya penurunan keuangan daerah, yang mana Pendapatan Asli Daerah ataupun dana perimbangan merasakan penurunan, tentunya ini sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, dengan berkurangnya pembiayaan pada pembangunan berarti menjelaskan belanja modal juga merasakan penurunan.

Terkhusus pada anggaran pada belanja barang dan jasa yang diyakini terlalu besar hingga diperlukannya pengurangan belanja yakni sejumlah Rp 8.814.483.110. Hal ini menandakan kinerja keuangan diindikasikan menurun sebab pada tahun 2020 pemerintah berupaya mengalihkan dana Belanja Barang dan Jasa ke penanganan kesehatan, serta penurunan ekonomi yang terjadi di tahun 2020.

Adanya peraturan daerah yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran dengan mengurangi pembiayaan-pembiayaan yang di yakini terlalu besar dan nantinya disalurkan untuk pembiayaan ataupun penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyedia jaring pengaman sosial.

Menurut Sudarsan (2013), Jumlah struktur dan bangunan yang dibangun untuk meningkatkan layanan masyarakat tercermin dalam belanja modal yang besar. Dampak terhadap keberhasilan keuangan Pemda makin baik makin tinggi belanja modal Pemda sebagai persentase dari belanja daerah secara keseluruhan. Pembangunan gedung dan pelaksanaan proyek infrastruktur ialah dua indikator keberhasilan anggaran pemerintah kota. Ini ialah ukuran berapa banyak uang yang dikeluarkan Pemda untuk proyek-proyek infrastruktur dalam upaya meningkatkan output dalam jangka panjang. Dengan begitu pengurangan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah ataupun dari dana perimbangan, pemerintah harus mengalihkan sebagian besar anggaran daerahnya untuk penanganan ekonomi selama masa pandemi.

Ada korelasi positif antara pendapatan kota dan keberhasilan keuangan Pemda, seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah penelitian sebelumnya, termasuk yang dilaksanakan oleh Antari dan Sedana (2018) dan Darwanis dan Saputra (2014). Wenny (2012) dan Julitawati et al. (2012) menemukan bahwa pendapatan asli daerah secara bersamaan berdampak besar terhadap kinerja keuangan, artinya semua komponen pendapatan asli daerah berdampak terhadap kinerja keuangan Pemda. Tetapi, penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) mengungkapkan adanya dampak yang merugikan dari pendapatan daerah terhadap keberhasilan keuangan Pemda.

Belanja modal dapat berfungsi sebagai indikator lain keberhasilan keuangan Pemda bersama dengan pendapatan pajak daerah. Menurut penelitian Astiti dan Mimba (2016), Pemda harus fokus pada pengembangan fasilitas semaksimal mungkin untuk mendongkrak keberhasilan keuangan daerah. Menurut studi oleh Andirfa et al. (2016), Mulyani dan Wibowo (2017), dan lainnya, belanja modal punya dampak lumayan besar terhadap keberhasilan keuangan Pemda. Berlawanan dengan Darwanis dan Saputra (2014), penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun belanja modal punya dampak merugikan secara langsung terhadap kinerja keuangan daerah, tetapi secara tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan melalui pendapatan daerah.

Informasi yang relevan yang diberi di atas menjelaskan bahwa penulis tertarik dalam melaksanakan studi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemrov Sumatera Utara”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah dijelaskan maka rumusan masalahnya yakni:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemrov Sumatera Utara ?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemrov Sumatera Utara ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemrov Sumatera Utara ?



### 1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yakni :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa pihak, termasuk yang berikut, diperkirakan akan memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini:

1. **Bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara**, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara.
2. **Bagi Peneliti**, menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam bidang akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan Pemda guna meningkatkan efisiensi dalam memakai anggaran pemerintah.
3. **Bagi Akademisi**, Penelitian ini harus berkontribusi pada pengembangan teori dan menjadi sumber informasi bagi akademisi pada umumnya, serta berkontribusi pada pengayaan universitas ataupun literatur global.

Khususnya bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian analog ataupun lanjutan. Khususnya yang berkaitan dengan akuntansi keuangan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah**

##### **2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah**

Kinerja (Performance) diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh entitas khusus selama periode waktu khusus sebagai salah satu ruang lingkup pekerjaan. Pengukuran kinerja dipakai sebagai indikator kinerja keuangan dan non keuangan dari tugas yang diselesaikan ataupun hasil yang berhasil dari suatu kegiatan, proses ataupun unit organisasi khusus. Data dari pengukuran kinerja dapat dijadikan tolak ukur untuk program-program yang akan datang sebab penilai lebih penting dari biasanya.

Menurut Nugroho (2012), kinerja keuangan ialah jenis kinerja khusus yang memakai indikator keuangan. Dengan melaksanakan berbagai analisis, analisis kinerja dalam konteks keuangan dilaksanakan guna menentukan sifat kinerjamasa lalu dan mengidentifikasi potensi kinerja masa depan.

Menurut Darwanis (2014), kinerja ialah hasil kerja seseorang, prosedur manajemen, ataupun organisasi khusus, dan hasil kerja harus diungkapkan secara lengkap dan dikenakan tindakan disipliner (dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan).

Keberhasilan diartikan sebagai hasil ataupun akibat dari suatu tindakan ataupun program yang mau dilaksanakan berhubung terhadap penggunaan jumlah serta kualitas sumber daya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian dari metrik yang bisa dipakai guna menilai kemampuan daerah untuk melaksanakan kedaulatannya ialah keberhasilan keuangan Pemda. Menurut Abdullah (2015), Kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat tercermin dari keberhasilan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk daerah yang terkena bencana pada batas-batas yang disepakati sesuai dengan aturan perundang-undangannya.

Ada lima jenis kinerja berbeda yang dipakai pemerintah untuk mengelola tenaga kerja keuangan yakni kemandirian, kemandirian, efisiensi, aktivitas, serta pertumbuhan. Dengan mengevaluasi efektifitas pemenuhan alokasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu anggaran, maka dapat diukur keberhasilan keuangan pemerintah daerah. Indikator efisiensi adalah metrik yang digunakan untuk menilai kemandirian dan efisiensi proses dengan penekanan pada tujuan perusahaan dan kelompok sasaran.

Menurut Fahmi (2012), menyelesaikan 16 tugas yang berbeda dapat menghasilkan kesuksesan finansial, yang merupakan tanda bahwa bisnis telah mencapai tujuannya. Bisa dikatakan bahwa kinerja keuangan ialah jenis analisis yang dilaksanakan guna menentukan bagaimana sebuah perusahaan menjalankan operasi keuangannya memakai prosedur yang baik dan benar.

Menurut beberapa teori keuangan itu, bisa diartikan bahwa kinerja keuangan yaitu ukuran kinerja organisasi ataupun pencapaian suatu perusahaan yang menggambarkan kesehatan keuangan melalui indikator-indikator seperti kesanggupan modal, likuiditas serta profitabilitas.

### 2.1.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemda

Pencapaian capaian itu akan ditampilkan melalui capaian pelaksanaan program yang terukur. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara efisien memberi landasan yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dan penyelesaian tugas tepat waktu. Pengukuran kinerja belanja pemerintah sangatlah penting, makadari itu capaian kinerja belanja pemerintah kota Medan dari tahun ke tahun dapat dinilai dari pengukuran kinerja. Melalui pengukuran kinerja belanja ini lah dapat mengetahui sejauh mana Pemda kota Medan menjalankan fungsinya. Menurut Abdul (2012 :161) tujuan pengukuran kinerja belanja pemerintah ialah:

Salah satu cara yang paling efektif guna menilai bagaimana Pemda mengelola keuangan mereka ialah untuk mengkaji APBD yang dibuat dan dipraktikkan ukuran keuangannya. (Halim, 2002: 126) menyatakan bahwa tujuan dari penelitian rasio keuangan ini ialah :

- a Menilai kemandirian keuangan daerah untuk memfasilitasi otonomi pemerintahan daerah.
- b Mengurangi efektivitas serta efisiensinya sekaligus mewujudkan potensi suatu daerah.
- c Mempertimbangkan semua kegiatan Pemda yang relevan saat menegosiasikan pendapatan daerah.
- d Mengakui kontribusi setiap individu yang berkontribusi terhadap keseluruhan upaya peningkatan kemakmuran daerah.
- e Meninjau perolehan/progres perolehan pendapatan dan beban berkelanjutan selama periode yang relevan.

### 2.1.3. Rasio-Rasio Kinerja Keuangan Pemda

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah, juga dikenal sebagai rasio devolusi fiskal, menjelaskan kesanggupan Pemda untuk membiayai sendiri operasional, pertumbuhan, serta penyediaan layanan untuk masyarakat umum sebagai sumber penghasilan yang dibutuhkan daerah. Algoritma berikut dipakai untuk menentukan persentase kebebasan finansial area.

(Mahmudi, 2010) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dengan membandingkan persentase keberhasilan dengan tujuan yang ditetapkan dari potensi daerah, bisa diketahui seberapa baik kinerja Pemda dalam mencapai APBD yang diinginkan. Akibatnya, angka ini kontras dengan APBD yang dinilai dan diinginkan (HALIM 2007). Algoritma berikut dapat dipakai untuk menentukan rasio efisiensi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari pembahasan tersebut bisa dikatakan apabila realisasi APBD berjalan relatif terhadap tujuan APBD maka rasio efisiensi keuangan daerah akan naik ataupun menurun. Dengan meningkatkan efisiensi ekonomi suatu daerah, maka APBD dapat dipakai secara efektif untuk melaksanakan proyek ataupun program kerja yang antara lain ditujukan untuk penyelesaian program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan penduduk setempat.

### c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dengan membandingkan persentase keberhasilan dengan tujuan yang ditetapkan dari potensi daerah, bisa diketahui seberapa baik kinerja Pemda dalam mencapai APBD yang diinginkan. Akibatnya, angka ini kontras dengan APBD yang dinilai dan diinginkan (HALIM 2007). Algoritma berikut dapat dipakai untuk menentukan rasio efisiensi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari pembahasan tersebut bisa dikatakan apabila realisasi APBD berjalan relatif terhadap tujuan APBD maka rasio efisiensi keuangan daerah akan naik ataupun menurun. Dengan meningkatkan efisiensi ekonomi suatu daerah, maka APBD dapat dipakai secara efektif untuk melaksanakan proyek ataupun program kerja yang antara lain ditujukan untuk penyelesaian program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan penduduk setempat.

### d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dengan membandingkan persentase keberhasilan dengan tujuan yang ditetapkan dari potensi daerah, bisa diketahui seberapa baik kinerja Pemda dalam mencapai APBD yang diinginkan. Akibatnya, angka ini kontras dengan APBD yang dinilai dan diinginkan (HALIM 2007). Algoritma berikut dapat dipakai untuk menentukan rasio efisiensi keuangan daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari pembahasan tersebut bisa dikatakan apabila realisasi APBD berjalan relatif terhadap tujuan APBD maka rasio efisiensi keuangan daerah akan naik ataupun menurun.

Dengan meningkatkan efisiensi ekonomi suatu daerah, maka APBD dapat dipakai secara efektif untuk melaksanakan proyek ataupun program kerja yang antara lain ditujukan untuk penyelesaian program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan penduduk setempat.

e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Keterkaitan antara intake dan output, ataupun pemenuhan potensi suatu wilayah dengan pencapaian potensinya, digambarkan dengan rasio efisiensi. Efektivitas meningkat seiring dengan penurunan persentase. Evaluasi efektivitas apa yang disebut layanan masyarakat dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan pemerintah kota. (Mahmudi, 2002). Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Jika angka yang ditentukan lebih besar dari 1 ataupun 100%, maka daerah itu dapat melaksanakan tugasnya dengan cukup efektif. Daerah dengan persentase efisiensi yang lebih besar lebih kaya. Evaluasi kinerja keuangan dapat dipakai untuk menentukan hasil kontras antara realisasi pengeluaran serta realisasi pendapatan memakai ukuran efisiensi (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Jika keberhasilan keuangan perusahaan di atas 100% dianggap boros; di bawah 60% dianggap sangat efisien; 90% – 100% kurang efisien; 80% – 90% cukup efisien.

f. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas ialah ukuran uang dimana dipakai dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana Pemda menekankan distribusi barang sebanyak mungkin. Rasio aktivitas dapat diukur sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$



g. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan menilai kemampuan Pemda ataupun kota untuk pertahankan serta membangun keberhasilan yang sudah diraih dari satu periode ke periode selanjutnya dengan melacak perkembangan setiap komponen pendapatan (pendapatan asli daerah serta total pendapatan dan belanja) (Belanja Pembangunan)

. Persentase perkembangan dapat dihitung sebagai berikut, menurut Halim (2008: 235):

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

r = Pertumbuhan dalam persen

P<sub>n</sub> = Realisasi pendapatan serta belanja di tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Realisasi pendapatan serta belanja di tahun awal ataupun tahun lalu

## 2.2. Pendapatan Asli Daerah

### 2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

(Rori et al., 2016) mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai uang yang dihasilkan oleh suatu daerah sesuai terhadap aturan perundang-undangannya dan dari peraturan daerah. Pendapatan daerah, menurut (Anggoro & Alfandia, 2018), yaitu sarana pemerintah pusat menyokong Pemda agar melaksanakan tindakan mandiri sesuai terhadap potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat serta Pemda sebagai pendapatan yang dihasilkan daerah itu sendiri dimana dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangannya formal.

Pendapatan yang dihasilkan secara lokal ialah ntuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, pendapatan daerah yang diinvestigasi dari daerah akan dipakai sebagai modal fundamental dalam mendanai pertumbuhan dan perusahaan daerah.

Untuk memungkinkan terwujudnya pemerintahan daerah yang besar, efektif, dan akuntabel, pendapatan asli daerah, ukuran resmi negara itu sendiri, harus dipertahankan dan ditingkatkan hingga dapat menjadi sumber pengeluaran yang diperlukan pemerintah dan memajukan kegiatan pembangunan masing-masing. tahun. (Siregar, 2017) mendefinisikan pendapatan awal sebagai uang yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah pada wilayah mereka sendiri, dimana dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerahnya dan undang-undang yang relevan.

Seberapa jauh daerah mampu mendanai inisiatif pemerintah serta pertumbuhan daerah bisa diketahui dengan melihat sektor pendapatan daerah yang memegang peranan penting. Menurut (Hanum, 2011), pendapatan asli daerah ialah suatu jenis uang dimana dihasilkan daerah yang penyelenggaraannya menarik perhatian Pemda. (Mardiasmo, 2002; Jolianis, 2012) menjelaskan PAD sebagai pendapatan yang menjelaskan kemampuan sebuah daerah dalam memakai dana baik untuk kegiatan rutin ataupun pembangunan. Dalam rangka memenuhi kewajibannya, Pemda secara rutin memanfaatkan potensi sumber daya keuangan daerah, sebagaimana dimaksud dengan istilah “pendapatan daerah”. Dari berbagai bukti yang diberi di sini, dapat dikatakan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dibuat berdasarkan pada persyaratan hukum serta dipakai untuk modal awal Pemda dalam menjalankan kebijakan serta membangun infrastruktur.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009, PAD yaitu bagian dari jenis pendanaan daerah. terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, kewenangan pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lainnya dimana berasal dari daerah yang bersangkutan. Menurut (Nugroho&Rohman, 2012) Pendapatan Asli Daerah bisa dihitung sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{PPD} + \text{PRD} + \text{HPKDD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

### 2.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 menyebutkan Kelompok Pendapatan Asli Daerah disusun menurut jenisnya dimana mencakup :

#### 1) Pajak daerah

Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2000 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Terkait Pajak Daerah serta Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah ialah pembayaran wajib yang dilaksanakan ke daerah oleh orang ataupun badan tanpa memperoleh keuntungan secara langsung. Pajak daerah menurut (Halim, 2016) yaitu pendapatan pajak daerah. Akibatnya, pajak bisa dimodifikasi untuk memasukkan pembayaran yang harus dilaksanakan oleh orang ataupun organisasi khusus untuk mencapai kesuksesan di negara khusus.

Hal ini dimungkinkan sebab, meskipun banyak pengumuman janji dan janji di depan umum, kemungkinan besar tidak ada yang tahu terkait pembayaranyang harus dilaksanakan dalam bentuk pajak yang bersangkutan. Pajak ialah pungutan yang dianggap bermutu tinggi dari aturan perundang-undangnya yang ada dan tidak termasuk pembayaran biaya tersembunyi kepadapembeli pajak.

Menurut Adriani, tujuan pajak dilihat dari objek, keadaan, tindakan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan perlunya pembayaran pajak di masa mendatang, baru kemudian subjeknya diidentifikasi apakah ada di Indonesia ataupun tidak. Golongan pajak objektif meliputi:

- (a) Pajak yang dipungut sebab kondisi antara lain pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak sebab penggunaan objek kena pajak;
- (b) Pajak yang dipungut sebagai hasil tindakan, termasuk pajak lalu lintas Pajak daerah terdiri atas pajak kabupaten/kota serta pajak provinsi.
- (c) (c) Biaya yang terkumpul sebagai akibat dari hal-hal seperti biaya transfer di Indonesia, seperti transfer properti. Pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota yaitu pajak daerah. Dari Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, pajak daerah meliputi:

- 1). Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2). Biaya Pindah tangan Kendaraan Bermotor.
- 3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4). Pajak Air Permukaan
- 5). Pajak Rokok.

Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota, yakni:

- 1) Pajak Restoran
- 2) Pajak Reklame.
- 3) Pajak Penerangan Jalan.
- 4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 5) Pajak Air Tanah.
- 6) Pajak Sarang Burung Walet.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Hotel.
- 9) Pajak Hiburan.
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menjelaskan bahwa ada jenis pajak lain yang ada di daerah selain yang disebutkan di atas. Apabila potensi jenis pajak ini di atas rata-rata serta/ataupun sesuai terhadap kebijakan daerah yang diambil sesuai aturan perundang-undangannya setempat, maka tidak dapat diterapkan.

## 2) Retribusi daerah

Pajak daerah diartikan sebagai iuran atas jasa ataupun yang diberi oleh Pemda untuk keperluan individu ataupun badan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut (Halim, 2016), retribusi suatu daerah yaitu bentuk kompensasi teritorial atas daerah itu. Menurut (Syahputra, 2010), alasan utama mengapa bidang penghargaan bertentangan dengan bidang pertahanan ialah sebab penghargaan biasanya

ditentukan dari kinerja, yang tidak harus punya batasan ketat yang samadengan bidang pertahanan. Hambatan utama untuk kompensasi ialah kurangnya layanan yang ditawarkan oleh Pemda. Dengan menetapkan jenis pengakuan di luar yang sudah diputuskan dan memenuhi standar dan harapan masyarakat yang sudah ditetapkan, peraturan/kota diberi kesempatan untuk menyelidiki potensi sumber daya keuangan mereka.

Dalam pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan objek retribusi terdiri dari:

1) Jasa Umum

Persyaratan retribusi layanan umum tidak terkait dengan pajak, tidak ada hubungannya dengan layanan perusahaan, dan tidak serupa dengan beberapa retribusi lisensi. Layanan terdesentralisasi dianggap sebagai agen daerah. Selain untuk mendukung kepentingan dan keuntungan masyarakat umum, layanan ini hanya membantu orang ataupun organisasi yang berkewajiban membayar biaya, dan yaitu layanan yang bermanfaat sebab membayar. Hukuman ialah satu-satunya pilihan yang menawarkan kekayaan yang sebesar-besarnya bagi daerah, efektif dan efisien, serta tidak berbenturan dengan kebijakan nasional mengenai jenis-jenis pelanggaran. menerapkan biaya untuk membuka jalan bagi penyampaian layanan yang, dari situasi, berkaitan dengan peningkatan harga dan/ataupun peningkatan kualitas.

Retribusi Berbagai Kategori Pelayanan Pemerintahan diartikan pada UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 sebagai berikut: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pencetakan Peta, Retribusi Jasa Kesehatan, Retribusi Penggantian Identitas dan Catatan Sipil, Retribusi Pembuangan/Kebersihan, layanan penguburan dan mayat,

biaya kontrol, dan biaya kontrol. biaya menara telekomunikasi, pembangunan jamban, jasa pendidikan, dan pengolahan limbah cair.

Retribusi jenis ini tidak berlaku apabila potensi realisasinya tidak mencukupi dan/ataupun bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun daerah dalam memberi pelayanan itu gratis.

## 2) Jasa Usaha

Pengertian “pungutan jasa usaha” dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan yang diberi oleh Pemda sesuai dengan asas komersial, mencakup pelayanan yang memakai ataupun menggunakan sumber daya daerah dimana belum sepenuhnya digunakan serta/ataupun pelayanan yang disediakan Pemda yang belum tersedia, termasuk dalam definisi ini. Retribusi penggunaan kekayaan daerah, retribusi pasar induk dan/ataupun toko, tempat lelang, terminal, parkir khusus, penginapan/villa, jasa pelabuhan, penyeberangan air, rekreasi dan olah raga, dan pungutan imbalan hasil penjualan hasil usaha daerah yaitu contoh pungutan jasa usaha.

## 3) Retribusi Perizinan Khusus

Sebagai bagian dari desentralisasi, pemerintah menyerahkan kewenangan khusus kepada daerah, termasuk perizinan. Perizinan ini sangat penting untuk menjaga biaya dan kepentingan masyarakat sebab memberi beban kepada daerah untuk melaksanakan izin dan mengatasi dampak yang tidak menguntungkan dari pemberian izin itu.

### 2.2.3. Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan sisi aturan perundang-undangnya, akses peningkatan Pendapatan Asli Daerah meningkat sebab adanya kenaikan harga ataupun kewajiban pajak daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 ini memberi penambahan untuk jenis pajak baru, yakni:

- 1) Sifatnya pajak serta bukan retribusi.
- 2) Objek pajak berada di wilayah kabupaten/kota yang terkait serta mobilitasnya rendah, juga cuma melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota mereka.
- 3) Informasi terkait dasar serta objek perpajakan secara umum tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
- 4) Objek pajak tidak harus berarti objek pajak provinsi ataupun objek pajak pusat.
- 5) Potensi yang memadai.
- 6) Tidak memberi dampak negatif terhadap ekonomi.
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan; dan
- 8) Memperhatikan aspek keadilan dan kapasitas masyarakat.

Otonomi suatu daerah tidak serta merta dieksploitasi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, menurut Mardiasmo (2013). Jika otonomi digambarkan sebagai upaya untuk mengeksploitasi penduduk asli daerah itu, maka penduduk lokal pasti akan menderita. Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada peningkatan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah sebab kedua komponen utama PAD itu di atas. Pemda selalu tidak membantu menaikkan pungutan pajak, jika ingin membantu menambah retribusi, sedangkan pajak hanya diupayakan sebagai upaya terakhir.



Pada UU No. 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan informasi keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemda, Pasal 7 menyatakan bahwa hal-hal berikut harus dilaksanakan untuk meningkatkan PAD, daerah tidak boleh :

- 1). Membatasi kemampuan Daerah untuk mengenakan denda atas kelebihan Pendapatan.
- 2). Menegaskan kembali peraturan daerah terkait pendapatan yang mengganggu mobilitas penduduk, kemudian mencantumkan kegiatan perdagangan dan diplomasi antar daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) yaitu peningkatan pendapatan yang diterima berdasarkan sumber pendapatan daerah pada tahun berikutnya. PAD dilihat pada tahun pertama (lag pertama), kedua (lag kedua), dan tahun ketiga (lag ketiga). Dalam Permendagri No. 26 Tahun 2006 terkait Pedoman Penyusunan APBD TA 2007 disebutkan bahwa penerimaan PAD harus ditingkatkan untuk menghindari penyebutan kebijakan Pemda yang mengancam dunia usaha dan masyarakat umum. Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah guna terwujudnya daya guna dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, penegakan hukum meningkatkan kerjasama dengan warga negara dan bea retribusi daerah.

### **2.3. Belanja Modal**

#### **2.3.1. Pengertian Belanja Modal**

Belanja modal diartikan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengeluaran yang dianggarkan dalam pembelian aset tetap serta aset lain dimana memberi keuntungan selama lebih dari satu periode buku.

Disarankan untuk melaksanakan penanaman modal untuk memperoleh aset tidak bergerak dari Pemda, seperti mesin awet, struktur awet, infrastruktur awet, dan aset awet. Bagian dari memenuhi persyaratan keuangan ialah belanja modal. Aset dan pengeluaran yang sangat teratur, seperti biaya layanan yang dibayarkan kepada pengeluaran kelompok untuk manajemen umum, kemungkinan besar akan dimasukkan dalam pengeluaran modal, yang yaitu pengeluaran Pemda yang berguna untuk menaklukkan anggaran tunggal.

Pengeluaran itu meliputi kategori belanja Peralatan Daerah dan jenis belanja Jasa Pemerintah (Mardiasmo, 2009). (Erlina, 2013) mencantumkan hal-hal berikut sebagai belanja modal

“Belanja modal ialah pengeluaran anggaran yang dilaksanakan guna memperoleh aset permanen yang punya keuntungan selama beberapa periode keuangan. Biaya pembelian ataupun pembangunan suatu aset ditambah semua biaya terkait sampai aset itu dapat dipakai yaitu nilai aset tetap pada pengeluaran modal.”

Menurut (Deddi, 2010), investasi modal ialah salah satu keuntungan yang biasanya bertahan + satu tahun fiskal serta yang dapat meningkatkan aset ataupun kekayaan organisasi sektor publik, meningkatkan anggaran kerja untuk biaya pemeliharaan dalam prosesnya. Menurut (Halim, 2011), belanja modal ialah pengeluaran keuangan yang dilaksanakan guna mendapatkan aset permanen serta aset lain dimana akan mempengaruhi ataupun mendapatkan keuntungan dari periode pembukuan yang berlangsung + satu periode.

Menurut Siregar (2015), belanja modal yaitu pengeluaran yang dilaksanakan terhadap perolehan aset tetap. Pengeluaran untuk mengeksekusi aset tetap diklasifikasikan sebagai aset tetap dalam akuntansi dari basis akrual. Sebab tidak ada yang namanya biaya modal sebagai ekuivalen modal perdagangan.

Untuk menyediakan aset permanen yang memenuhi persyaratan administrasi kota dan masyarakat, belanja modal dialokasikan. Banyak bukti yang tercantum di atas menjelaskan bahwa Belanja Modal yaitu alat yang dipakai pemerintah guna melaksanakan anggaran khusus, seperti aset tetap ataupun aset lain yang bisa memberi fungsi melebihi jangka waktu yang sudah disepakati dan dipakai pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

### 2.3.2. Macam-Macam Belanja Modal

Menurut (Wertianti dan Dwirandra, 2013), ada lima kategori yang tergolong Belanja Modal, yakni : 1) Belanja Peralata dan Mesin; 2) Belanja Aset Tetap Lainnya; 3) Belanja Modal Jalan, Irigasi serta Jaringan; 4) Belanja Modal Tanah; dan 5) Belanja Gedung dan Bangunan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dituangkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal bisa digolongkan menjadi lima kategori utama sebagai berikut:

#### 1) Belanja Modal Tanah, pertama

Belanja Modal Tanah ialah pengeluaran anggaran ataupun pengeluaran yang dipakai untuk pembelian, pembelian ataupun penyelesaian peralihan hak serta kontrak tanah, tanah kosong, penimbunan kembali, perataan, pematangan tanah, sertifikat produksi dan penerbitan.

#### 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pengeluaran yang dianggarkan ataupun biaya yang dipakai untuk tujuan menambah, ataupun mengganti, serta meningkatkan kapasitas peralatan mesin dan inventaris ataupun aset kantor yang memberi manfaat selama melebihi satu periode disebut sebagai belanja modal peralatan dan permesinan.

### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan pembangunan gedung yang meningkatkan kapasitas gedung serta gedung yang masih layak pakai termasuk dalam belanja modal untuk gedung dan gedung yang dipakai untuk akuisisi, penambahan, ataupun penggantian.

### 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal.

Untuk keperluan pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta pemeliharaan, seperti biaya perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan jalan, sistem irigasi, juga jaringan dalam keadaan baik, pengeluaran anggaran ataupun biaya yang dikenal dengan belanja modal jalan, irigasi, serta jaringan dipakai.

### 5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Pengeluaran anggaran ataupun biaya untuk membuat, membuat dan memelihara belanja modal fisik lainnya yang tidak bisa digolongkan sebagai belanja modal tanah, belanja modal serta mesin, belanja modal irigasi, jalan juga jaringan, dan belanja modal bangunan serta gedung, dikenal dengan belanja modal fisik yang lain. belanja modal. Membeli modal kontak, karya seni, artefak, juga barang untuk museum, serta membeli hewan, ternak, serta tumbuh-tumbuhan, sastra, majalah ilmiah, juga modal kontak ialah contoh pengeluaran modal fisik lainnya.

Faktor utama yang diperhatikan oleh Pemda ketika memberi bantuan kepada masyarakat ialah aset tetap yang ada sebab adanya uang. Untuk menumbuhkan aset permanen, pemerintah kota menganggarkan uang untuk belanja modal dalam APBD.

Menurut peneliti sebelumnya (Yasin & Kasino, 2018), mengatakan bahwa pendanaan dialokasikan ke berbagai program pembangunan, termasuk yang bersifat fisik seperti jalan, gedung dan gedung untuk tempat tinggal masyarakat, ataupun yang spiritual seperti sesi pelatihan dan non - Fiskal yang seperti penebusan dosa. Alhasil, pendanaan selalu sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan, kemudian dialokasikan ke berbagai bidang.

Distribusi belanja modal ditentukan oleh kebutuhan prasarana dan sarana daerah, baik untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan ataupun untuk penyediaan fasilitas umum. Output masyarakat diperkirakan akan meningkat sebagai hasil dari penyediaan infrastruktur yang sangat baik, yang bisa membantu efisiensi pada bermacam sektor. Perkembangan waktu usaha yaitu salah satu dari sekian banyak tugas ekonomi yang harus didukung oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan pengembalian pengeluaran sehari-hari, pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas yang berbeda dilaksanakan. Akibatnya, masyarakat umum akan lebih terlibat dan termotivasi untuk bekerja, yang akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan minat investor di wilayah itu. Sebagai hasil dari produktivitas mereka, penduduk lokal dan investor akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan asli negara.

Selain itu, peningkatan tingkat penerimaan devisa di suatu daerah akan memberi tekanan kepada Pemda agar meningkatkan tingkat pelayanan publik yang diberi untuk masyarakat, dimana dapat berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di daerah itu relevan terhadap peningkatan penerimaan negara pendapatan per kapita.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal termasuk belanja modal untuk proyek tanah, gedung juga bangunan, serta peralatan serta aset tidak berwujud.

Belanja modal diukur melalui perhitungan sebagai berikut :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Keterangannya :

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

#### 2.4. Penelitian Terdahulu

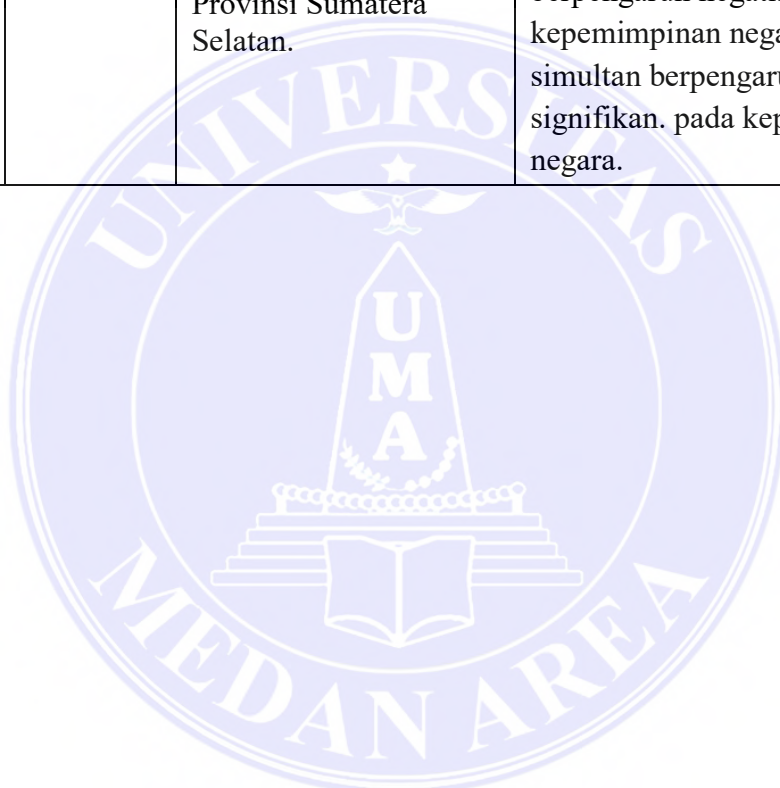
Banyak penelitian terdahulu terkait pengukuran kualitas laba serta beberapa faktor yang mempengaruhi sudah banyak dilaksanakan. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu oleh peneliti-peneliti, diantaranya:

**Tabel 2.1**  
**Peneliti Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ihsan (2020)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, serta Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.	Menurut temuan penelitian, sementara belanja modal tidak punya dampak yang substansial dan bermanfaat bagi keberhasilan keuangan pemerintah, pendapatan kota dan dana cadangan punyanya. Di sisi lain, keberhasilan keuangan Pemda dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh dana perimbangan, belanja modal, dan pendapatan asli daerah.

2.	Novita (2020)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, serta Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan	Temuan tes menjelaskan dampak yang menguntungkan dan substansial dari pendapatan kota dan belanja modal pada keberhasilan keuangan. Terlepas dari kenyataan bahwa Dana Netral tidak punya dampak menguntungkan pada hasil keuangan.
3.	Utami (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Bali.	Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa Provinsi Kabupaten/Kota di Bali merasakan perkembangan ekonomi yang baik dan substansial antara tahun 2012 hingga 2017. Tetapi, rasa terlindungi di masyarakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendapatan daerah, belanja modal, dan ekonomi. Tetapi, dampak dari mode pengeluaran terhadap ketidaknyamanan umum masyarakat antara tahun 2012 dan 2017 tidak signifikan.
4.	Ni Putu (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda.	Dari hasil penelitian diketahui bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Sebaliknya, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan pada Kinerja Keuangan Pemda.

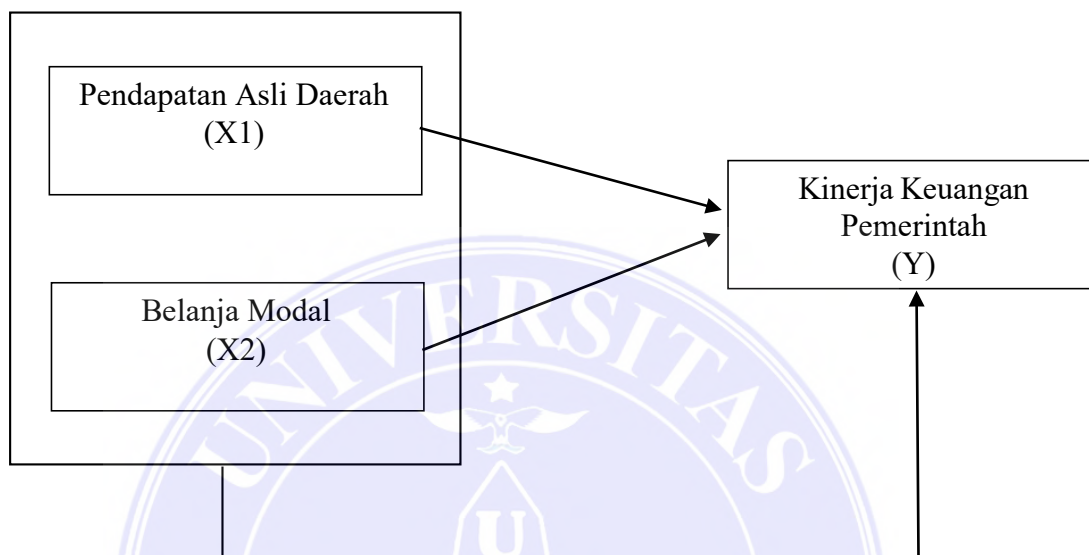
5.	Wardiah (2018)	Pengaruh PAD serta Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.	Menurut hasil penelitian, PAD serta Belanja Modal berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian.
6.	Lis (2018)	Pengaruh PAD, Belanja Modal serta SiLP pada Kinerja Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	Dari hasil penelitian, Pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak punya pengaruh terhadap kinerja Pemda, sedangkan SILPA berpengaruh negatif pada kepemimpinan negara tetapi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan. pada kepemimpinan negara.





## 2.1. Kerangka Konseptual

Dari uraian di atas, maka peneliti akan merumuskan kerangkakonseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.1. Hipotesis Penelitian

### 2.1.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang dihasilkan berdasarkan pada aturan perundang-undangannya daerah yang relevan terhadap UU RI No. 33 Tahun 2004. Sumber dana dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di suatu daerah yaitu sumber pendapatan yang asalnya dari PAD (Halim, 2014: 169). Menurut Mahmudi (2009:18), jika suatu daerah punya kemampuan untuk menghasilkan PAD, maka hal itu juga akan dapat dilaksanakan jika penggunaan pendapatan itu sesuai dengan kebutuhan serta rencana pembangunan daerah itu.

Pendapatan daerah bisa meningkat jika kapasitas daerah dipakai untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensinya untuk menghasilkan pendapatan dari luar. Pemda dapat mengurangi dampak buruk dari bantuan keuangan yang diterima dari pusat berkat pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh daerah yang sudah membantu mendorong peningkatan pendapatan. Klaim itu di atas relevan terhadap penelitian Nugroho serta Rohman (2012) dimana menjelaskan hal bahwa peningkatan jumlah kontribusi pemerintah asing terhadap perekonomian lokal dapat meningkatkan kemampuan Pemda untuk mengelola urusannya sendiri, hingga punya implikasi bagi kebijakan internal Pemda. Dengan memakai pungutan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, Darwanis dan Saputra (2014) menyatakan bahwan pemerintah bisa meningkatkan PAD hingga meningkatkan tingkat kinerja keuangannya.

Ihsan (2020), Ni Putu (2018), Novita (2020), dan Wardiah (2018), mengklaim bahwa cara Pemda menangani uangnya berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

H<sub>1</sub> : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara ialah positif dan signifikan.

### **2.1.2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan**

Belanja modal termasuk dalam belanja daerah yang dipakai untuk mendanai pembangunan aset tetap daerah, sesuai Pemendagri No. 13 Tahun 2006. Baik Dewi & Budhi (2015) dan Muhammadiyah et al. (2015) sependapat bahwa belanja modal yaitu bagian dari jenis belanja pemerintah kota yang bisa menambah aset sekaligus memberi keuntungan jangka panjang. Salah satu proyek belanja modal yang diinginkan dapat mendongkrak pembangunan pendapatan daerah serta dapat berdampak pada perekonomian daerah ialah pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum.

Penegasan itu sejalan dengan klaim Halim bahwa program belanja modal Pemda diantisipasi mampu menghasilkan ataupun menghasilkan dampak yang berjenjang pada pembangunan ekonomi daerah (2014: 228). Menurut Yulia dan Mimba (2016), peningkatan keteraturan keberhasilan keuangan Pemda dapat dijelaskan dengan fakta bahwa daerah dapat meningkatkan kuantitas pendanaan untuk menaikkan tingkat pendapatannya dengan mengalokasikan uang dengan modal yang lebih banyak.

Pertumbuhan infrastruktur pemerintah kota ialah tempat ditemukannya tugas belanja modal dengan potensi keuntungan yang tinggi. Seseorang dapat berargumen bahwa pertumbuhan kesuksesan finansial pejabat Pemda dapat didorong dengan membangun pembangunan dalam bentuk fasilitas kontemporer untuk layanan dasar manusia. (Puspitasari et al., 2015). Menurut Andirfa dkk. (2016), infrastruktur yang ada di suatu daerah semoga pada akhirnya menghasilkan efisiensi di berbagai sektor, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menghasilkan kondisi kerja yang lebih baik bagi aparatur Pemda. Selain itu, Mulyani (2017), Novita (2020), dan Wardiah (2018) menemukan bahwa hubungan antara capital stakes dan aktivitas mata uang Pemda ialah positif serta signifikan.

H<sub>2</sub> : Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Utara berpengaruh positif dan signifikan.

### **2.1.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan**

Bidang pendapatan serta pengeluaran yang ditemukan dalam laporan realitas anggaran akan berdampak pada kesuksesan finansial. Kenyataan bahwa belanja modal serta pendapatan daerah dapat berdampak pada keberhasilan keuangan (PAD) terbukti dari banyaknya komponen yang ada dalam realisasi anggaran, dengan peringatan bahwa belanja modal tumbuh dalam jumlah dan intensitas, demikian pula produktivitas ekonomi lokal dalam situasi ini yang yaitu kinerja Pemda. Pemerintah punya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli negara melalui penerapan kebijakan retributif dan perpajakan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat luas yang memanfaatkan dana yang disetujui untuk anggaran belanja modal dalam rangka realisasi anggaran. Sehingga Pemda dapat dengan efektif mengelola kinerja keuangannya.

Lathifah (2018), Novita (2020) dan Kusnadi (2019) Mendukung penelitian ini, dimana mereka membuktikan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemda berpengaruh positif juga signifikan.

H<sub>3</sub> : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian kuantitatif ialah jenis penelitian ini. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan statistik numerik sebagai metode untuk mengumpulkan pengetahuan terkait topik yang sedang diselidiki. Studi terkait ukuran keberhasilan finansial akan dipakai untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan secara jujur. Sedangkan metode asosiasi ialah salah satu yang dipakai pada penelitian ini yang mana pendekatan yang dilaksanakan mengenai hubungan dari variabel independen serta variabel dependen.

##### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Gedung Johor Medan Kode Pos 20143; Telp/Fax.7863567 - 78060633 Website : <http://distan.sumutprov.go.id/>E-mail:distan\_propsu@yahoo.com

##### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Adapun rencana kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 hingga Juni 2022, rincian pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2021			2022					
		Okt	Nov	Des	Jan	Mar	Mei	Jul	Agst	Okt
1.	Pengajuan Judul Skripsi	■								
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■					
3.	Bimbingan Proposal		■	■						
4.	Seminar Proposal				■	■	■			
5.	Pengumpulan data dan analisis data						■			
6.	Penyusunan dan bimbingan Skripsi						■			
7.	Seminar Hasil							■	■	
8.	Sidang Meja Hijau									■

*Sumber: Disesuaikan dengan kegiatan peneliti, 2021*

### 3.2. Populasi dan Sampel

#### 3.2.1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2008) populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek ataupun objek yang punya karakter & kualitas khusus yang ditentukan oleh seorang peneliti agar dipelajari yang kemudian diambil kesimpulan. Populasi pada penelitian ini ialah Seluruh Laporan Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara.

#### 3.2.2. Sampel Penelitian

Pengertian sampel menurut (Sugiyono, 2008) "Sampel ialah bagian dari populasi dimana sifat-sifatnya perlu dipelajari dan dianggap secara akurat mencerminkan keseluruhan populasi ataupun sebagian darinya." Dengan cara ini, seleksi berfungsi sebagai bagian ataupun studi representatif yang dapat mencirikan populasi.

Purposive sampling ialah teknik yang dipakai. Artinya sampel dipilih dari pertimbangan khusus, dan data yang diperoleh sifatnya representatif. Parameter seleksi yang dipakai adalah statistik LRA dan Neraca Komoditas Pangan dan Hortikultura Dinas Propinsi Sumatera Utara. Kedua kantor ini sudah diperiksa catatannya oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) antara tahun 2015 dan 2021.

Hingga sampel pada penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran Pemrov Sumatera Utara selama 7 tahun periode (2015-2021) dengan masing-masing periode terbagi menjadi 4 (laporan triwulan) hingga total sampelsebanyak 30 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Statistik kuantitatif ialah jenis data yang dipakai pada penelitian ini. Data kuantitatif, seperti yang diartikan oleh Sugiyono (2015), ialah informasi yang ditampilkan dalam bentuk angka.

#### **3.3.2. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder. Yang mana data sekunder pada penelitian ini ialah data pendukung yang didapatkan dari hasil penelusuran catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. buku-buku referensi, jurnal ilmiah serta media lainnya yang sesuai terhadap masalah yang dibahas pada penelitian ini.



### 3.4. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Menurut peraturan daerah dan aturan perundang-undangannya yang relevan, seluruh pendapatan yang berasal dari daerah dikumpulkan.  (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)	$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$  (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)	<i>Rasio</i>
Belanja Modal (X2)	Pengeluaran sesuai anggaran untuk mendapatkan ataupun meningkatkan nilai aset tetap ataupun aset lain dengan masa pakai yang lebih lama dari satu periode akuntansi.  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71. Tahun 2010)	$BM = BT + BPM + BGD + BJIJ$  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71. Tahun 2010)	<i>Rasio</i>
Kinerja Keuangan Pemda (Y)	Kinerja Keuangan adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.	Rasio Pertumbuhan :  $r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$	<i>Rasio</i>

	(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).	(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).	
--	---	---	--

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Menurut Hamidi (2004: 72), metode dokumentasi ialah cara akademisi memperoleh data dengan cara mendapatkan catatan dari orang-orang terpercaya yang akrab dengan narasumber, seperti laporan Pemenuhan Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Utara.

### 3.6. Teknik Analisa Data

#### 3.6.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik yang menemukan cara mengumpulkan, mengatur, dan menampilkan data untuk suatu penelitian dikenal sebagai statistik deskriptif. Statistik deskriptif melukis gambar ataupun menggambarkan sekumpulan data yang mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range.

#### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, akan diperiksa penyimpangan dari prinsip dasar. Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas adalah tiga uji yang harus dijalankan dalam premis klasik.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya untuk menguji sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas ataupun keduanya apakah punya distribusi normal ataupun tidak. kriteria pengambilan keputusan, yakni :

1. Nilai sig / probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi tidak normal
2. Nilai sig / probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi normal

### 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara faktor-faktor independen dalam model regresi (Ghozali, 2011). Faktor-faktor independen dalam model regresi berganda memiliki korelasi yang sempurna atau hampir sempurna saat diuji multikolonieritas. Seseorang dapat memeriksa keberadaan indikator multikolonieritas baik menggunakan angka toleransi atau program SPSS.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas tujuannya agar tau apakah volatilitas suatu residual dari data lain tidak sama pada model regresi (Ghozali, 2011). Bisa dikatakan bahwa heteroskedastisitas tidak ada jika variasi menampilkan struktur yang ditetapkan. Istilah homokedastisitas dan heteroskedastisitas mengacu pada variasi residual dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Histogram scatterplot dapat dipakai agar tau apakah ada heteroskedastisitas ataupun tidak.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi tujuannya guna menentukan apakah galat yang mengganggu di periode T serta galat yang mengganggu di periode T-1 berkorelasi pada model regresi linier (sebelumnya). Masalah asosiasi dikenal sebagai masalah autokorelasi. (Ghozali, 2011, hal. 110)

#### 3.6.3. Uji Analisis Regresi Berganda

Menggunakan analisis regresi linier berganda untuk ukuran statistik. Teknik yang disebut regresi linier berganda digunakan untuk memvisualisasikan data sebagai bilangan bulat. Hasil penelitian ini merupakan data numerik. Berikut hasil kajian para ahli dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2015:204):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kinerja Keuangan Pemda
X1	= Pendapatan Asli Daerah
X2	= Belanja Modal
a	= Konstanta
e	= Error

#### 3.6.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Parsial (Uji t)

Keberhasilan keuangan Pemprov Sumatera Utara diperiksa dengan memakai uji T agar tau apakah ada hubungan yang signifikan dari faktor independen dan faktor dependen dari variabel dependen.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menentukan apakah setiap variabel bebas ataupun bebas dalam model punya pengaruh terhadap variabel terikat ataupun variabel terikat secara bersama-sama. Atau pun apakah keberhasilan keuangan Pemprov Sumut sekaligus dipengaruhi oleh faktor pendapatan daerah dan belanja modal.

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Kemampuan model untuk mendeskripsikan variabel dependen diukur dengan memakai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan daerah dan belanja konstruksi terhadap keberhasilan keuangan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ada kisaran 0 sampai 1 untuk koefisien determinasi. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa variabel bebas punya pengaruh yang lebih besar pada variabel terikat apabila nilai R Square mendekati satu. Ini menjelaskan bahwa model yang dipakai guna memperhitungkan bagaimana faktor independen dipengaruhi oleh variabel dependen menjadi lebih kuat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang dilaksanakan penulis terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara, maka penulis mengambil kesimpulannya yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara. Dari Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima OPD menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara berasal dari hasil retribusi daerah, yang di dominasi oleh retribusi jasa usaha. Rata-rata setiap tahunnya, 7% pendapatan retribusi jasa usaha dihasilkan dari retribusi penyewaan bangunan, 2% retribusi pelayanan tempat penginapan/persangrahan/villa dan 91% retribusi terbesar ialah penjualan produksi hasil usaha berupa bibit ataupun benih tanaman.
2. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Sumatera Utara. Dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyatakan bahwa rata-rata Belanja Modal berasal dari beberapa bagian yakni 60% berasal dari belanja modal peralatan serta mesin, 23% belanja modal gedung juga bangunan, 12% belanja modal jalan, irigasi serta jaringan juga 5% berasal dari belanjamodal aset tetap lainnya.

3. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan serta Hortikultura Pemprov Sumatera Utara. Diharapkan dengan meningkatkan belanja modal pemerintah, suatu daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum daerah, yang selanjutnya dapat menghasilkan sumber keuangan yang tentunya akan meningkatkan return to Pendapatan Asli Daerah. . Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui uji Koefisien Determinasi dapat dibuktikan bahwa kontribusi variabel pendapatan daerah dan belanja modal dapat mendongkrak kinerja keuangan pemerintah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sejumlah 41,6%, dengan sisi lain hubungan tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. misalnya : Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, SiLPA, Belanja Operasi dan lain-lain.

## 5.2 Saran

1. Bagi peneliti berikutnya supaya menambah tahun pengamatan yang lebih panjang serta terbaru, serta memperluas populasi penelitian tidak hanya pada satu instansi saja hingga makin besar kesempatan untuk memberi gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan.

2. Penelitian berikutnya semoga juga bisa mengembangkan variabel independen yang dipakai. Pengembangan ini perlu dilaksanakan mengingat banyak variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi Kinerja Keuangan seperti : Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, SiLPA (SiLPA), Belanja Operasi dan lain-lain.
4. Kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sudah dikatakan baik meskipun pendapatan asli daerah menjelaskan angka yang lebih kecil dibandingkan belanja modal tetapi bisa dikatakan nominal itu masih dapat diatasi, Balai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara fokus pada peningkatan dan pengembangan kinerja keuangan daerah dengan memanfaatkan potensi serta keterampilan daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah. yang berasal dari retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ataupun benih tanaman, retribusi pelayanan tempat penginapan/ persanggrahan/ villa dan retribusi penyewaan bangunan serta disarankan agar menambah wajib pajak terkait Pendapatan Asli Daerah setempat.
5. Selanjutnya berupaya terus mengelola belanja modal dengan baik dengan meningkatkan belanja modal tidak hanya pada peralatan dan mesin tetapi juga pengalokasian pada belanja modal gedung serta bangunan juga belanja modal jalan, irigasi serta jaringan. Agar secara keseluruhan pencapaian anggaran Pemda dapat terealisasi secara merata dan tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Berbasis AkruaI. Penerbit: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan , Bandung: Alfabeta
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.
- KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI). (Online, diakses tanggal 26
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Erlangga.
- Mahmudi. 2002. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik.Edisi Kedua. Jakarta:Salemba Empat
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta

### Jurnal :

- Abdullah dan Febriansyah, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Andirfa, Mulia, Basri, Hasan & A.Majid, M.Shabri. 2016. ‘Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh’. vol.5. no.3. hal. 30-38.
- Antari, Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

- terhadap Kinerja Keuangan Pemda. ISSN:2302-8912
- Astiti, Desak Nyoman Yulia & Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemda. vol. 14. no. 3. hal. 1924-1950
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Djuniar. Lis. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan SiLPA (SILPA) Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Gina. Ni Putu. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Jurnal Manajemen Universitas Udayana.
- Iqlima A. Manaf, Muhammad Arfan, dan Darwanis. 2014. Pengaruh Pemahaman Terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Proses Reviu Laporan Keuangan Pemda Oleh Inspektorat Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi ISSN : 2302-0164, 3(4) : 23-35.
- Julitawati, dkk. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi ISSN2302-0164 Volume I, No.I, Agustus 2012. Universitas Syiah Kuala.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. 2017. Pengaruh belanja modal, ukuran Pemda, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemda. KOMPARTEMEN Vol. 15 No. 1.
- Nugroho, Akram Arif, 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Boyolali APBD 2008 – 2010. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rori, Chindy Febri, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. Jurnal Berkal Ilmiah Efisiensi volume 16 no. 2

- Sari, Novita. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Siregar, Helly Aroza. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pembangunan Manusia Di Kota Pekanbaru Dengan Pertumbuhan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *KURS*. Vol. 2 No. 1: 1-13
- Sudarsan N , S. P. 2017. Assessing the influence of work-life balance dimensions among nurses in the. *Journal of Management Development*.
- Sudarsana, Hafidh Susila & Rahardjo, Shiddiq Nur. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. vol. 2. no. 4.hal. 1-13.
- Utami, D.N. & Indrajaya, I.G.B. 2019. Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP UNUD*, 8(10), 2195 – 2225
- Wenny, Dhia Cerrya. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2, No.I, September 2012. STIE MDP*.
- Wertianti, I G A Gede dan Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi. *E-Journal Akuntansi Udayana* 4.3 (2013): 567-584

**Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang:**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020, Terkait

Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Terkait Pedoman

Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 terkait Pedoman Penyusunan APBD.

Republik Indonesia. 2006. Permendagri No 13 Tahun 2006 terkait Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

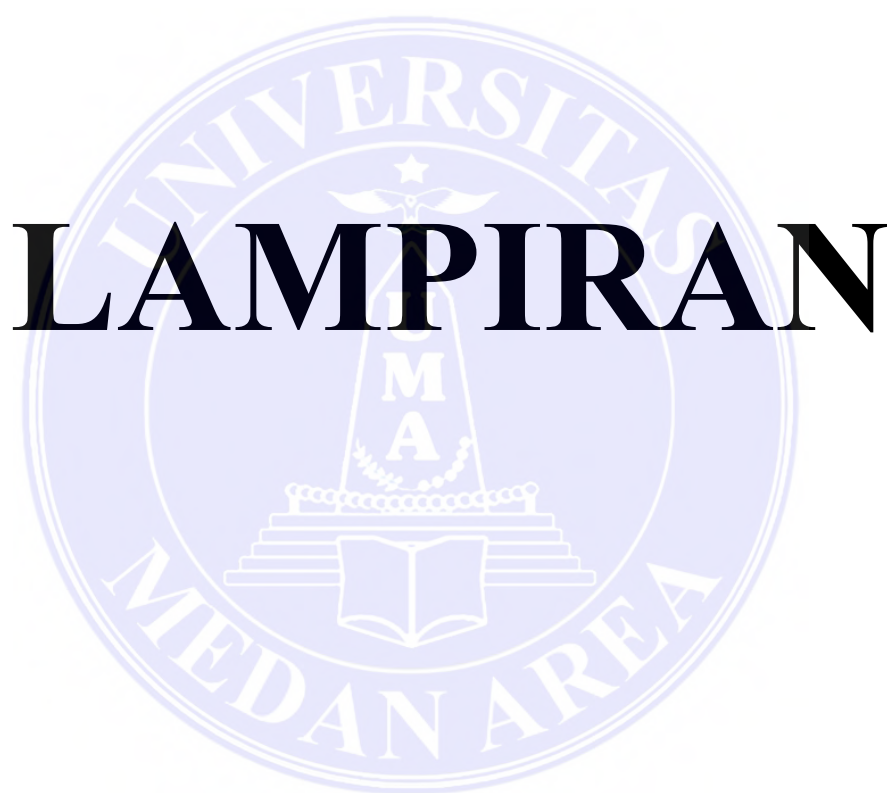
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Pemda.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Terkait Pajak Daerah dan Restribusi daerah.Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 terkait Pembagian

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta:

Sekretariat Negara.



**Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan &  
Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2021**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2015**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>345,900,431</b>	<b>330,579,128</b>	<b>95.57</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>345,900,431</b>	<b>330,579,128</b>	<b>95.57</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	345,900,431	330,579,128	95.57
<b>BELANJA</b>	<b>34,763,763,222</b>	<b>32,517,046,789</b>	<b>93.54</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>29,693,300,007</b>	<b>28,346,476,118</b>	<b>95.46</b>
Belanja Pegawai	16,838,922,000	16,311,909,023	96.87
Belanja Barang dan Jasa	12,854,378,007	12,034,567,095	93.62
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,070,463,215</b>	<b>4,170,570,671</b>	<b>82.25</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,909,740,985	2,309,127,615	79.36
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,279,086,480	990,866,778	77.47
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	800,658,129	789,665,995	98.63
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80,977,621	80,910,283	99.92
SURPLUS/(DEFISIT)	-34,417,862,791	-32,186,467,661	93.52
SILPA (SILPA)	-34,417,862,791	-32,186,467,661	93.52

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>421,367,001</b>	<b>411,638,409</b>	<b>97.69</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>421,367,001</b>	<b>411,638,409</b>	<b>97.69</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	421,367,001	411,638,409	97.69
<b>BELANJA</b>	<b>27,093,642,954</b>	<b>25,404,530,445</b>	<b>93.77</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20,978,300,007</b>	<b>20,011,271,203</b>	<b>95.39</b>
Belanja Pegawai	11,823,922,000	10,908,330,083	92.26
Belanja Barang dan Jasa	9,154,378,007	9,102,941,120	99.44
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,115,342,947</b>	<b>5,393,259,242</b>	<b>88.19</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,897,360,017	2,198,645,390	75.88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,567,002,221	2,567,002,221	100.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	600,000,000	582,628,993	97.10
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50,980,709	44,982,638	88.23
SURPLUS/(DEFISIT)	-26,672,275,953	-24,992,892,036	93.70
SILPA (SILPA)	-26,672,275,953	-24,992,892,036	93.70

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>555,900,431</b>	<b>550,963,653</b>	<b>99.11</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>555,900,431</b>	<b>550,963,653</b>	<b>99.11</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	555,900,431	550,963,653	99.11
<b>BELANJA</b>	<b>31,709,396,995</b>	<b>31,169,934,701</b>	<b>98.30</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16,633,805,309</b>	<b>16,454,536,592</b>	<b>98.92</b>
Belanja Pegawai	9,003,876,309	8,905,232,730	98.90
Belanja Barang dan Jasa	7,629,929,000	7,549,303,862	98.94
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15,075,591,686</b>	<b>14,715,398,109</b>	<b>97.61</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,097,306,976	5,000,042,257	98.09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,872,550,938	4,801,235,097	98.54
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,097,366,839	1,007,536,960	91.81
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,008,366,933	3,906,583,795	97.46
SURPLUS/(DEFISIT)	-31,153,496,564	-30,618,971,048	98.28
SILPA (SILPA)	-31,153,496,564	-30,618,971,048	98.28



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>703,376,393</b>	<b>703,102,937</b>	<b>99.96</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>703,376,393</b>	<b>703,102,937</b>	<b>99.96</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	703,376,393	703,102,937	99.96
<b>BELANJA</b>	<b>39,977,449,324</b>	<b>38,808,522,479</b>	<b>97.08</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19,556,605,296</b>	<b>18,580,706,950</b>	<b>95.01</b>
Belanja Pegawai	10,836,368,663	9,870,071,212	91.08
Belanja Barang dan Jasa	8,720,236,633	8,710,635,738	99.89
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20,420,844,028</b>	<b>20,227,815,529</b>	<b>99.05</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,029,273,583	6,019,837,583	99.84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,009,272,899	5,001,826,753	99.85
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,083,223,909	8,972,052,463	98.78
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	299,073,637	234,098,730	78.27
SURPLUS/(DEFISIT)	-39,274,072,931	-38,105,419,542	97.02
SILPA (SILPA)	-39,274,072,931	-38,105,419,542	97.02

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2016**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>902,753,363</b>	<b>902,426,809</b>	<b>99.96</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>902,753,363</b>	<b>902,426,809</b>	<b>99.96</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	902,753,363	902,426,809	99.96
<b>BELANJA</b>	<b>18,440,578,817</b>	<b>17,077,076,994</b>	<b>92.61</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10,174,913,099</b>	<b>10,163,280,941</b>	<b>99.89</b>
Belanja Pegawai	1,092,625,577	1,082,354,685	99.06
Belanja Barang dan Jasa	9,082,287,522	9,080,926,256	99.99
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,265,665,718</b>	<b>6,913,796,053</b>	<b>83.64</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,092,761,222	2,081,997,200	67.32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,092,625,899	3,982,750,353	97.32
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	780,227,252	549,028,764	70.37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300,051,345	300,019,736	99.99
SURPLUS/(DEFISIT)	-17,537,825,454	-16,174,650,185	92.23
SILPA (SILPA)	-17,537,825,454	-16,174,650,185	92.23

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>906,837,464</b>	<b>906,712,546</b>	<b>99.99</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>906,837,464</b>	<b>906,712,546</b>	<b>99.99</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	906,837,464	906,712,546	99.99
<b>BELANJA</b>	<b>18,996,030,802</b>	<b>16,463,750,768</b>	<b>86.67</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12,653,649,196</b>	<b>10,185,651,528</b>	<b>80.50</b>
Belanja Pegawai	10,927,396,358	8,464,647,655	77.46
Belanja Barang dan Jasa	1,726,252,838	1,721,003,873	99.70
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,342,381,606</b>	<b>6,278,099,240</b>	<b>98.99</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,129,203,988	4,083,389,039	98.89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,093,763,571	2,088,653,733	99.76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58,476,409	55,763,635	95.36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60,937,638	50,292,833	82.53
SURPLUS/(DEFISIT)	-18,089,193,338	-15,557,038,222	86.00
SILPA (SILPA)	-18,089,193,338	-15,557,038,222	86.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>908,363,588</b>	<b>907,036,544</b>	<b>99.85</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>908,363,588</b>	<b>907,036,544</b>	<b>99.85</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	908,363,588	907,036,544	99.85
<b>BELANJA</b>	<b>11,246,643,709</b>	<b>10,901,881,764</b>	<b>96.93</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,012,202,177</b>	<b>1,986,482,609</b>	<b>98.72</b>
Belanja Pegawai	1,103,836,799	1,086,353,633	98.42
Belanja Barang dan Jasa	908,365,378	900,128,976	99.09
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,234,441,532</b>	<b>8,915,399,155</b>	<b>96.55</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,373,356,837	5,283,657,383	98.33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,873,693,733	1,653,940,614	88.27
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,937,363,599	1,928,763,635	99.56
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50,027,363	49,037,523	98.02
SURPLUS/(DEFISIT)	-10,338,280,121	-9,994,845,220	96.68
SILPA (SILPA)	-10,338,280,121	-9,994,845,220	96.68

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>999,778,778</b>	<b>908,336,736</b>	<b>90.85</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>999,778,778</b>	<b>908,336,736</b>	<b>90.85</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	999,778,778	908,336,736	90.85
<b>BELANJA</b>	<b>11,412,792,557</b>	<b>10,984,786,439</b>	<b>96.25</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,805,730,015</b>	<b>1,760,731,919</b>	<b>97.51</b>
Belanja Pegawai	908,366,383	900,348,267	99.12
Belanja Barang dan Jasa	897,363,632	860,383,652	95.88
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9,607,062,542</b>	<b>9,224,054,520</b>	<b>96.01</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,393,038,736	7,112,657,383	96.21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,908,363,572	1,807,357,790	94.71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	240,292,779	239,735,464	99.77
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65,367,455	64,303,883	98.37
SURPLUS/(DEFISIT)	-10,413,013,779	-10,076,449,703	96.77
SILPA (SILPA)	-10,413,013,779	-10,076,449,703	96.77

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2017**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>918,736,382</b>	<b>913,038,364</b>	<b>99.38</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>918,736,382</b>	<b>913,038,364</b>	<b>99.38</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	918,736,382	913,038,364	99.38
<b>BELANJA</b>	<b>4,641,567,355</b>	<b>4,441,461,198</b>	<b>95.69</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>797,675,462</b>	<b>769,753,781</b>	<b>96.50</b>
Belanja Pegawai	384,745,076	371,003,837	96.43
Belanja Barang dan Jasa	412,930,386	398,749,944	96.57
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,843,891,893</b>	<b>3,671,707,417</b>	<b>95.52</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,937,464,840	2,783,948,744	94.77
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	872,432,425	856,048,476	98.12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,900,073	10,872,833	99.75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23,094,555	20,837,364	90.23
SURPLUS/(DEFISIT)	-3,722,830,973	-3,528,422,834	94.78
SILPA (SILPA)	-3,722,830,973	-3,528,422,834	94.78

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>915,487,409</b>	<b>914,805,966</b>	<b>99.93</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>915,487,409</b>	<b>914,805,966</b>	<b>99.93</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	915,487,409	914,805,966	99.93
<b>BELANJA</b>	<b>4,604,337,464</b>	<b>4,531,207,500</b>	<b>98.41</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>667,403,222</b>	<b>651,802,010</b>	<b>97.66</b>
Belanja Pegawai	308,364,849	300,864,647	97.57
Belanja Barang dan Jasa	359,038,373	350,937,363	97.74
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3,936,934,242</b>	<b>3,879,405,490</b>	<b>98.54</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,937,464,840	2,883,948,744	98.18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	965,474,774	963,746,549	99.82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,900,073	10,872,833	99.75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23,094,555	20,837,364	90.23
SURPLUS/(DEFISIT)	-3,688,850,055	-3,616,401,534	98.04
SILPA (SILPA)	-3,688,850,055	-3,616,401,534	98.04

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>916,847,473</b>	<b>916,776,868</b>	<b>99.99</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>916,847,473</b>	<b>916,776,868</b>	<b>99.99</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	916,847,473	916,776,868	99.99
<b>BELANJA</b>	<b>5,729,306,312</b>	<b>5,548,526,788</b>	<b>96.84</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>609,705,368</b>	<b>594,325,938</b>	<b>97.48</b>
Belanja Pegawai	311,300,494	301,287,464	96.78
Belanja Barang dan Jasa	298,404,874	293,038,474	98.20
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,119,600,944</b>	<b>4,954,200,850</b>	<b>96.77</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,937,464,840	2,883,948,744	98.18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,065,474,774	1,953,633,312	94.59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90,863,676	90,861,230	100.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,797,654	25,757,564	99.84
SURPLUS/(DEFISIT)	-4,812,458,839	-4,631,749,920	96.24
SILPA (SILPA)	-4,812,458,839	-4,631,749,920	96.24



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>917,524,422</b>	<b>917,235,735</b>	<b>99.97</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>917,524,422</b>	<b>917,235,735</b>	<b>99.97</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	917,524,422	917,235,735	99.97
<b>BELANJA</b>	<b>5,743,151,838</b>	<b>5,571,132,668</b>	<b>97.00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>605,626,858</b>	<b>591,571,171</b>	<b>97.68</b>
Belanja Pegawai	315,243,436	301,453,836	95.63
Belanja Barang dan Jasa	290,383,422	290,117,335	99.91
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,137,524,980</b>	<b>4,979,561,497</b>	<b>96.93</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,037,464,840	2,883,948,744	94.95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,965,474,774	1,962,074,643	99.83
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	108,496,758	107,537,754	99.12
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26,088,608	26,000,356	99.66
SURPLUS/(DEFISIT)	-4,825,627,416	-4,653,896,933	96.44
SILPA (SILPA)	-4,825,627,416	-4,653,896,933	96.44

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2018**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>922,485,544</b>	<b>922,345,357</b>	<b>99.98</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>922,485,544</b>	<b>922,345,357</b>	<b>99.98</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	922,485,544	922,345,357	99.98
<b>BELANJA</b>	<b>6,111,805,146</b>	<b>6,078,021,592</b>	<b>99.45</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>605,626,858</b>	<b>591,571,171</b>	<b>97.68</b>
Belanja Pegawai	315,243,436	301,453,836	95.63
Belanja Barang dan Jasa	290,383,422	290,117,335	99.91
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,506,178,288</b>	<b>5,486,450,421</b>	<b>99.64</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,364,866,550	3,351,368,535	99.60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,012,654,475	2,006,543,776	99.70
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	102,568,655	102,537,754	99.97
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26,088,608	26,000,356	99.66
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,189,319,602	-5,155,676,235	99.35
SILPA (SILPA)	-5,189,319,602	-5,155,676,235	99.35

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>931,585,325</b>	<b>930,746,853</b>	<b>99.91</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>931,585,325</b>	<b>930,746,853</b>	<b>99.91</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	931,585,325	930,746,853	99.91
<b>BELANJA</b>	<b>6,105,992,770</b>	<b>6,052,089,635</b>	<b>99.12</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>625,879,190</b>	<b>611,987,594</b>	<b>97.78</b>
Belanja Pegawai	315,243,436	301,453,836	95.63
Belanja Barang dan Jasa	310,635,754	310,533,758	99.97
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,480,113,580</b>	<b>5,440,102,041</b>	<b>99.27</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,125,755,997	3,085,997,654	98.73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,123,464,325	2,123,266,586	99.99
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	200,425,694	200,378,090	99.98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30,467,564	30,459,711	99.97
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,174,407,445	-5,121,342,782	98.97
SILPA (SILPA)	-5,174,407,445	-5,121,342,782	98.97

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2018**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>942,474,545</b>	<b>940,283,654</b>	<b>99.77</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>942,474,545</b>	<b>940,283,654</b>	<b>99.77</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	942,474,545	940,283,654	99.77
<b>BELANJA</b>	<b>6,429,939,715</b>	<b>6,406,113,007</b>	<b>99.63</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>625,879,190</b>	<b>611,987,594</b>	<b>97.78</b>
Belanja Pegawai	315,243,436	301,453,836	95.63
Belanja Barang dan Jasa	310,635,754	310,533,758	99.97
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,804,060,525</b>	<b>5,794,125,413</b>	<b>99.83</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,274,644,575	3,270,968,696	99.89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,278,658,655	2,275,069,677	99.84
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	210,383,646	210,038,464	99.84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40,373,649	38,048,576	94.24
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,487,465,170	-5,465,829,353	99.61
SILPA (SILPA)	-5,487,465,170	-5,465,829,353	99.61

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>945,769,687</b>	<b>945,769,687</b>	<b>100.00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>945,769,687</b>	<b>945,769,687</b>	<b>100.00</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	945,769,687	945,769,687	100.00
<b>BELANJA</b>	<b>6,611,024,741</b>	<b>6,605,178,784</b>	<b>99.91</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>624,322,552</b>	<b>623,051,280</b>	<b>99.80</b>
Belanja Pegawai	314,756,595	314,304,847	99.86
Belanja Barang dan Jasa	309,565,957	308,746,433	99.74
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5,986,702,189</b>	<b>5,982,127,504</b>	<b>99.92</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,345,445,408	3,343,045,759	99.93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,374,957,560	2,373,058,574	99.92
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	225,065,576	225,065,576	100.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41,233,645	40,957,595	99.33
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,665,255,054	-5,659,409,097	99.90
SILPA (SILPA)	-5,665,255,054	-5,659,409,097	99.90

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>947,653,733</b>	<b>947,384,795</b>	<b>99.97</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>947,653,733</b>	<b>947,384,795</b>	<b>99.97</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	947,653,733	947,384,795	99.97
<b>BELANJA</b>	<b>6,602,679,480</b>	<b>6,597,193,404</b>	<b>99.92</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>587,839,232</b>	<b>582,771,939</b>	<b>99.14</b>
Belanja Pegawai	289,374,478	284,645,485	98.37
Belanja Barang dan Jasa	298,464,754	298,126,454	99.89
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,014,840,248</b>	<b>6,014,421,465</b>	<b>99.99</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,356,760,875	3,356,686,057	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,387,565,948	2,387,404,585	99.99
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	227,464,867	227,305,967	99.93
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43,048,558	43,024,856	99.94
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,655,025,747	-5,649,808,609	99.91
SILPA (SILPA)	-5,655,025,747	-5,649,808,609	99.91

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>956,383,646</b>	<b>956,305,967</b>	<b>99.99</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>956,383,646</b>	<b>956,305,967</b>	<b>99.99</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	956,383,646	956,305,967	99.99
<b>BELANJA</b>	<b>6,711,358,843</b>	<b>6,692,278,817</b>	<b>99.72</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>546,345,471</b>	<b>545,577,311</b>	<b>99.86</b>
Belanja Pegawai	290,484,786	290,483,566	100.00
Belanja Barang dan Jasa	255,860,685	255,093,745	99.70
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,165,013,372</b>	<b>6,146,701,506</b>	<b>99.70</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,349,576,676	3,343,548,505	99.82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,469,475,757	2,459,374,659	99.59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25,474,465	25,128,795	98.64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	320,486,474	318,649,547	99.43
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,754,975,197	-5,735,972,850	99.67
SILPA (SILPA)	-5,754,975,197	-5,735,972,850	99.67

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>976,867,686</b>	<b>975,135,374</b>	<b>99.82</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>976,867,686</b>	<b>975,135,374</b>	<b>99.82</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	976,867,686	975,135,374	99.82
<b>BELANJA</b>	<b>6,849,702,523</b>	<b>6,821,449,432</b>	<b>99.59</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>546,345,471</b>	<b>545,577,311</b>	<b>99.86</b>
Belanja Pegawai	290,484,786	290,483,566	100.00
Belanja Barang dan Jasa	255,860,685	255,093,745	99.70
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,303,357,052</b>	<b>6,275,872,121</b>	<b>99.56</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,750,587,474	2,725,353,749	99.08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,103,874,650	2,101,735,474	99.90
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	264,947,464	264,835,434	99.96
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,183,947,464	1,183,947,464	100.00
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,872,834,837	-5,846,314,058	99.55
SILPA (SILPA)	-5,872,834,837	-5,846,314,058	99.55



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>983,685,756</b>	<b>982,565,957</b>	<b>99.89</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>983,685,756</b>	<b>982,565,957</b>	<b>99.89</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	983,685,756	982,565,957	99.89
<b>BELANJA</b>	<b>6,815,898,858</b>	<b>6,805,878,346</b>	<b>99.85</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>505,437,348</b>	<b>501,109,205</b>	<b>99.14</b>
Belanja Pegawai	264,951,758	260,734,547	98.41
Belanja Barang dan Jasa	240,485,590	240,374,658	99.95
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,310,461,510</b>	<b>6,304,769,141</b>	<b>99.91</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,547,494,744	2,545,793,744	99.93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,803,745,484	1,802,745,484	99.94
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	274,263,536	271,364,954	98.94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,684,957,746	1,684,864,959	99.99
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,832,213,102	-5,823,312,389	99.85
SILPA (SILPA)	-5,832,213,102	-5,823,312,389	99.85

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>989,856,586</b>	<b>989,856,586</b>	<b>100.00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>989,856,586</b>	<b>989,856,586</b>	<b>100.00</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	989,856,586	989,856,586	100.00
<b>BELANJA</b>	<b>6,848,747,817</b>	<b>6,836,113,855</b>	<b>99.82</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>516,794,394</b>	<b>506,117,150</b>	<b>97.93</b>
Belanja Pegawai	271,049,447	260,486,665	96.10
Belanja Barang dan Jasa	245,744,947	245,630,485	99.95
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,331,953,423</b>	<b>6,329,996,705</b>	<b>99.97</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,558,465,748	2,557,397,447	99.96
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,803,456,575	1,803,387,565	100.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	284,346,454	283,648,157	99.75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,685,684,646	1,685,563,536	99.99
SURPLUS/(DEFISIT)	-5,858,891,231	-5,846,257,269	99.78
SILPA (SILPA)	-5,858,891,231	-5,846,257,269	99.78

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,038,736,484</b>	<b>1,034,373,547</b>	<b>99.58</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,038,736,484</b>	<b>1,034,373,547</b>	<b>99.58</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,038,736,484	1,034,373,547	99.58
<b>BELANJA</b>	<b>7,275,598,233</b>	<b>7,271,848,347</b>	<b>99.95</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>489,233,643</b>	<b>486,526,326</b>	<b>99.45</b>
Belanja Pegawai	245,484,058	243,769,686	99.30
Belanja Barang dan Jasa	243,749,585	242,756,640	99.59
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,786,364,590</b>	<b>6,785,322,021</b>	<b>99.98</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,746,585,665	1,746,585,665	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,845,735,475	1,845,363,833	99.98
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	347,567,595	347,403,847	99.95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,846,475,855	2,845,968,676	99.98
SURPLUS/(DEFISIT)	-6,236,861,749	-6,237,474,800	100.01
SILPA (SILPA)	-6,236,861,749	-6,237,474,800	100.01

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,074,464,847</b>	<b>1,074,364,575</b>	<b>99.99</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,074,464,847</b>	<b>1,074,364,575</b>	<b>99.99</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,074,464,847	1,074,364,575	99.99
<b>BELANJA</b>	<b>7,383,534,526</b>	<b>7,383,141,093</b>	<b>99.99</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>493,990,160</b>	<b>493,866,252</b>	<b>99.97</b>
Belanja Pegawai	246,440,585	246,408,576	99.99
Belanja Barang dan Jasa	247,549,575	247,457,676	99.96
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6,889,544,366</b>	<b>6,889,274,841</b>	<b>100.00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,173,648,473	2,173,548,575	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,436,435,474	1,436,357,857	99.99
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	405,885,775	405,804,865	99.98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,873,574,644	2,873,563,544	100.00
SURPLUS/(DEFISIT)	-6,309,069,679	-6,308,776,518	100.00
SILPA (SILPA)	-6,309,069,679	-6,308,776,518	100.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,096,585,754</b>	<b>1,095,374,474</b>	<b>99.89</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,096,585,754</b>	<b>1,095,374,474</b>	<b>99.89</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,096,585,754	1,095,374,474	99.89
<b>BELANJA</b>	<b>8,035,136,680</b>	<b>7,974,755,553</b>	<b>99.25</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>627,714,104</b>	<b>626,022,112</b>	<b>99.73</b>
Belanja Pegawai	241,645,446	240,374,648	99.47
Belanja Barang dan Jasa	386,068,658	385,647,464	99.89
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,407,422,576</b>	<b>7,348,733,441</b>	<b>99.21</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,248,474,647	2,240,585,795	99.65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,749,474,647	1,704,847,468	97.45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	505,737,335	500,453,635	98.96
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,903,735,947	2,902,846,543	99.97
SURPLUS/(DEFISIT)	-6,938,550,926	-6,879,381,079	99.15
SILPA (SILPA)	-6,938,550,926	-6,879,381,079	99.15

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,103,464,949</b>	<b>1,102,846,473</b>	<b>99.94</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,103,464,949</b>	<b>1,102,846,473</b>	<b>99.94</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,103,464,949	1,102,846,473	99.94
<b>BELANJA</b>	<b>8,232,375,625</b>	<b>8,197,581,384</b>	<b>99.58</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>669,893,948</b>	<b>669,846,244</b>	<b>99.99</b>
Belanja Pegawai	279,447,474	279,400,847	99.98
Belanja Barang dan Jasa	390,446,474	390,445,397	100.00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,562,481,677</b>	<b>7,527,735,140</b>	<b>99.54</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,178,470,904	2,158,696,867	99.09
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,859,576,446	1,852,484,747	99.62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	576,968,668	575,966,760	99.83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,947,465,659	2,940,586,766	99.77
SURPLUS/(DEFISIT)	-7,128,910,676	-7,094,734,911	99.52
SILPA (SILPA)	-7,128,910,676	-7,094,734,911	99.52

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,247,696,776</b>	<b>1,246,549,575</b>	<b>99.91</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,247,696,776</b>	<b>1,246,549,575</b>	<b>99.91</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,247,696,776	1,246,549,575	99.91
<b>BELANJA</b>	<b>8,228,610,547</b>	<b>8,218,215,543</b>	<b>99.87</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>621,171,533</b>	<b>620,994,334</b>	<b>99.97</b>
Belanja Pegawai	270,585,769	270,508,576	99.97
Belanja Barang dan Jasa	350,585,764	350,485,758	99.97
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,607,439,014</b>	<b>7,597,221,209</b>	<b>99.87</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,037,646,748	2,036,486,464	99.94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,803,933,730	1,800,746,464	99.82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	740,484,753	732,603,535	98.94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,025,373,783	3,027,384,746	100.07
SURPLUS/(DEFISIT)	-6,980,913,771	-6,971,665,968	99.87
SILPA (SILPA)	-6,980,913,771	-6,971,665,968	99.87

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,259,474,646</b>	<b>1,259,474,646</b>	<b>100.00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,259,474,646</b>	<b>1,259,474,646</b>	<b>100.00</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,259,474,646	1,259,474,646	100.00
<b>BELANJA</b>	<b>8,822,128,513</b>	<b>8,810,605,794</b>	<b>99.87</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>679,414,230</b>	<b>678,282,938</b>	<b>99.83</b>
Belanja Pegawai	273,546,464	272,645,474	99.67
Belanja Barang dan Jasa	405,867,766	405,637,464	99.94
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,142,714,283</b>	<b>8,132,322,856</b>	<b>99.87</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,103,937,335	2,100,487,484	99.84
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,997,464,644	1,992,645,474	99.76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	836,464,839	836,343,434	99.99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,204,847,465	3,202,846,464	99.94
SURPLUS/(DEFISIT)	-7,562,653,867	-7,551,131,148	99.85
SILPA (SILPA)	-7,562,653,867	-7,551,131,148	99.85



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,403,846,474</b>	<b>1,402,846,464</b>	<b>99.93</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,403,846,474</b>	<b>1,402,846,464</b>	<b>99.93</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,403,846,474	1,402,846,464	99.93
<b>BELANJA</b>	<b>9,418,244,793</b>	<b>9,313,804,239</b>	<b>98.89</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>890,633,136</b>	<b>885,526,132</b>	<b>99.43</b>
Belanja Pegawai	495,757,548	494,679,668	99.78
Belanja Barang dan Jasa	394,875,588	390,846,464	98.98
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8,527,611,657</b>	<b>8,428,278,107</b>	<b>98.84</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,368,554,334	2,359,654,567	99.62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,045,644,660	2,040,978,797	99.77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	986,457,887	900,886,977	91.33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,126,954,776	3,126,757,766	99.99
SURPLUS/(DEFISIT)	-8,014,398,319	-7,910,957,775	98.71
SILPA (SILPA)	-8,014,398,319	-7,910,957,775	98.71

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,283,464,949</b>	<b>1,302,846,473</b>	<b>101.51</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,283,464,949</b>	<b>1,302,846,473</b>	<b>101.51</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,283,464,949	1,302,846,473	101.51
<b>BELANJA</b>	<b>9,332,375,625</b>	<b>8,209,581,384</b>	<b>87.97</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,769,893,948</b>	<b>1,681,846,244</b>	<b>95.03</b>
Belanja Pegawai	879,447,474	879,400,847	99.99
Belanja Barang dan Jasa	890,446,474	802,445,397	90.12
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,562,481,677</b>	<b>6,527,735,140</b>	<b>86.32</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,178,470,904	1,158,696,867	53.19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,859,576,446	1,852,484,747	99.62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	576,968,668	575,966,760	99.83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,947,465,659	2,940,586,766	99.77
SURPLUS/(DEFISIT)	-8,048,910,676	-6,906,734,911	85.81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-8,048,910,676	-6,906,734,911	85.81

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>1,156,696,776</b>	<b>1,387,549,575</b>	<b>119.96</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA</b>	<b>1,156,696,776</b>	<b>1,387,549,575</b>	<b>119.96</b>
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1,156,696,776	1,387,549,575	119.96
<b>BELANJA</b>	<b>9,428,610,547</b>	<b>8,382,015,544</b>	<b>88.90</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,821,171,533</b>	<b>1,784,794,335</b>	<b>98.00</b>
Belanja Pegawai	970,585,769	900,508,577	92.78
Belanja Barang dan Jasa	850,585,764	884,285,758	103.96
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7,607,439,014</b>	<b>6,597,221,209</b>	<b>86.72</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,037,646,748	1,036,486,464	50.87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,803,933,730	1,800,746,464	99.82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	740,484,753	732,603,535	98.94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,025,373,783	3,027,384,746	100.07
SURPLUS/(DEFISIT)	-8,271,913,771	-6,994,465,969	84.56
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-8,271,913,771	-6,994,465,969	84.56

TAHUN	PERIODE	TOTAL BELANJA	KINERJA KEUANGAN(Y)
2015	1	32,517,046,789	59.52%
	2	25,404,530,445	-21.87%
	3	31,169,934,701	22.69%
	4	38,808,522,479	24.51%
2016	1	17,077,076,994	-56.00%
	2	16,463,750,768	-3.59%
	3	10,901,881,764	-33.78%
	4	10,984,786,439	0.76%
2017	1	4,441,461,198	-59.57%
	2	4,531,207,500	2.02%
	3	5,548,526,788	22.45%
	4	5,571,132,668	0.41%
2018	1	6,078,021,592	9.10%
	2	6,052,089,635	-0.43%
	3	6,406,113,007	5.85%
	4	6,605,178,784	3.11%
2019	1	6,597,193,404	-0.12%
	2	6,692,278,817	1.44%
	3	6,821,449,432	1.93%
	4	6,805,878,346	-0.23%
2020	1	6,836,113,855	0.44%
	2	7,271,848,347	6.37%
	3	7,383,141,093	1.53%
	4	7,974,755,553	8.01%
2021	1	8,197,581,384	2.79%
	2	8,218,215,543	0.25%
	3	8,810,605,794	7.21%
	4	9,313,804,239	5.71%
2022	1	8,209,581,384	2.94%
	2	8,382,015,544	2.10%

TAHUN	PERIODE	PAD (X1)	BELANJA MODAL (X2)	KINERJA KEUANGAN (Y)
2015	1	330,579,128	4,170,570,671	59.52%
	2	411,638,409	5,393,259,242	-21.87%
	3	550,963,653	14,715,398,109	22.69%
	4	703,102,937	20,227,815,529	24.51%
2016	1	902,426,809	6,913,796,053	-56.00%
	2	906,712,546	6,278,099,240	-3.59%
	3	907,036,544	8,915,399,155	-33.78%
	4	908,336,736	9,224,054,520	0.76%
2017	1	913,038,364	3,671,707,417	-59.57%
	2	914,805,966	3,879,405,490	2.02%
	3	916,776,868	4,954,200,850	22.45%
	4	917,235,735	4,979,561,497	0.41%
2018	1	922,345,357	5,486,450,421	9.10%
	2	930,746,853	5,440,102,041	-0.43%
	3	940,283,654	5,794,125,413	5.85%
	4	945,769,687	5,982,127,504	3.11%
2019	1	947,384,795	6,014,421,465	-0.12%
	2	956,305,967	6,146,701,506	1.44%
	3	975,135,374	6,275,872,121	1.93%
	4	982,565,957	6,304,769,141	-0.23%
2020	1	989,856,586	6,329,996,705	0.44%
	2	1,034,373,547	6,785,322,021	6.37%
	3	1,074,364,575	6,889,274,841	1.53%
	4	1,095,374,474	7,348,733,441	8.01%
2021	1	1,102,846,473	7,527,735,140	2.79%
	2	1,246,549,575	7,597,221,209	0.25%
	3	1,259,474,646	8,132,322,856	7.21%
	4	1,402,846,464	8,428,278,107	5.71%
2022	1	1,302,846,473	6,527,735,140	2.94%
	2	1,387,549,575	6,597,221,209	2.25%

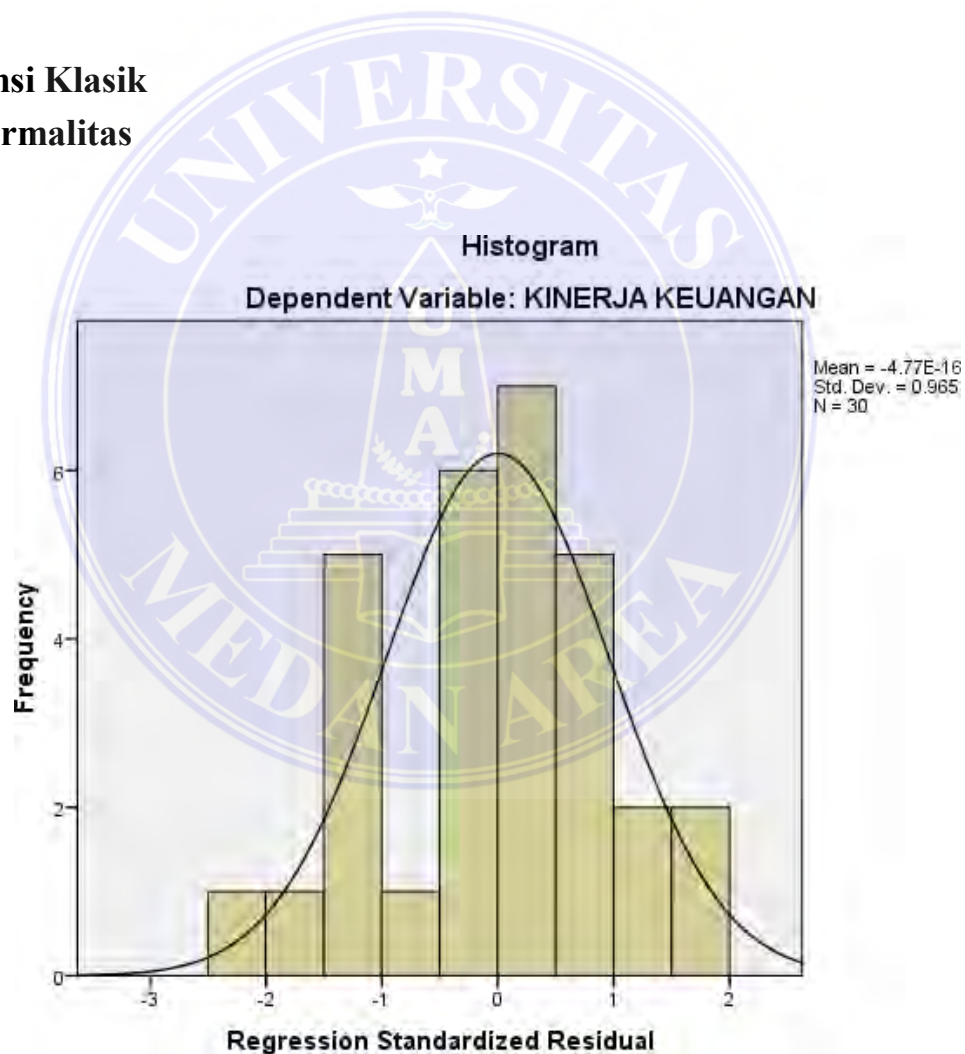
## Lampiran 2. Output SPSS

### Statistik Deskripsi

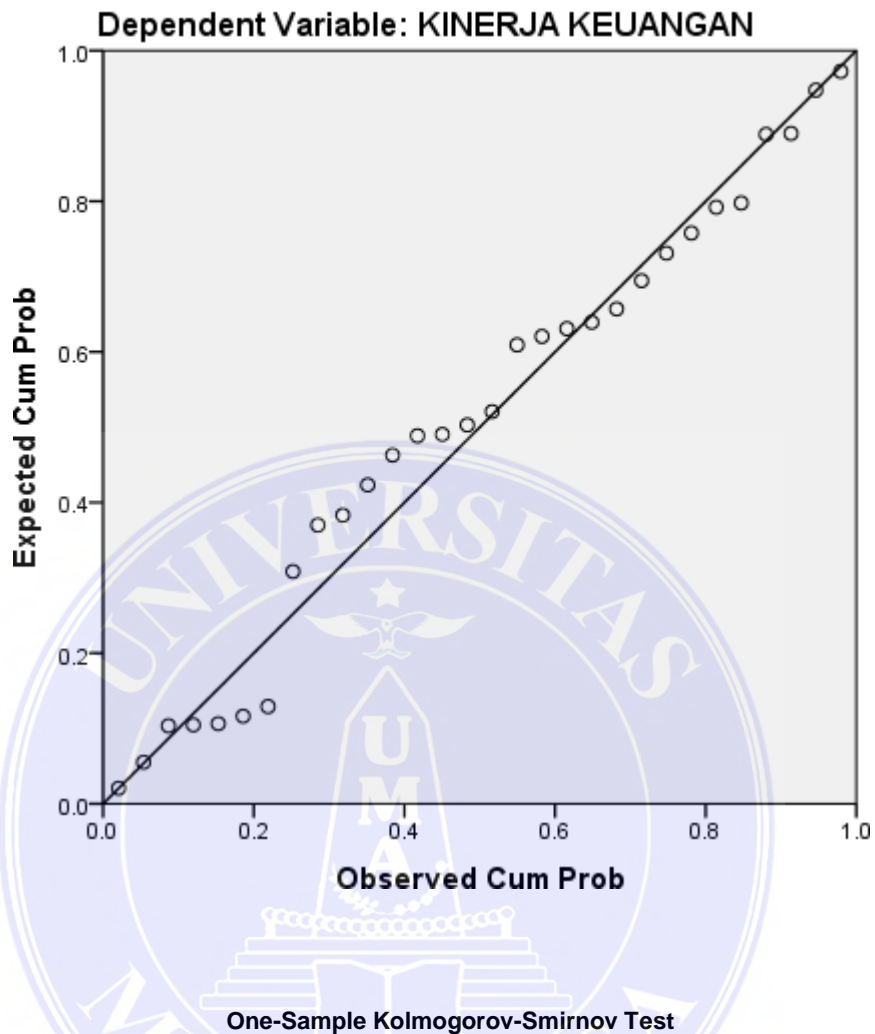
Descriptive Statistics							
	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	30	1.44	19.62	21.06	20.6423	.30977	.096
BELANJA MODAL	30	1.71	22.02	23.73	22.6167	.34314	.118
KINERJA KEUANGAN	30	6.20	-6.72	-.52	-3.2873	1.75758	3.089
Valid N (listwise)	30						

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas



### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56129642
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.617
Asymp. Sig. (2-tailed)		.840

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

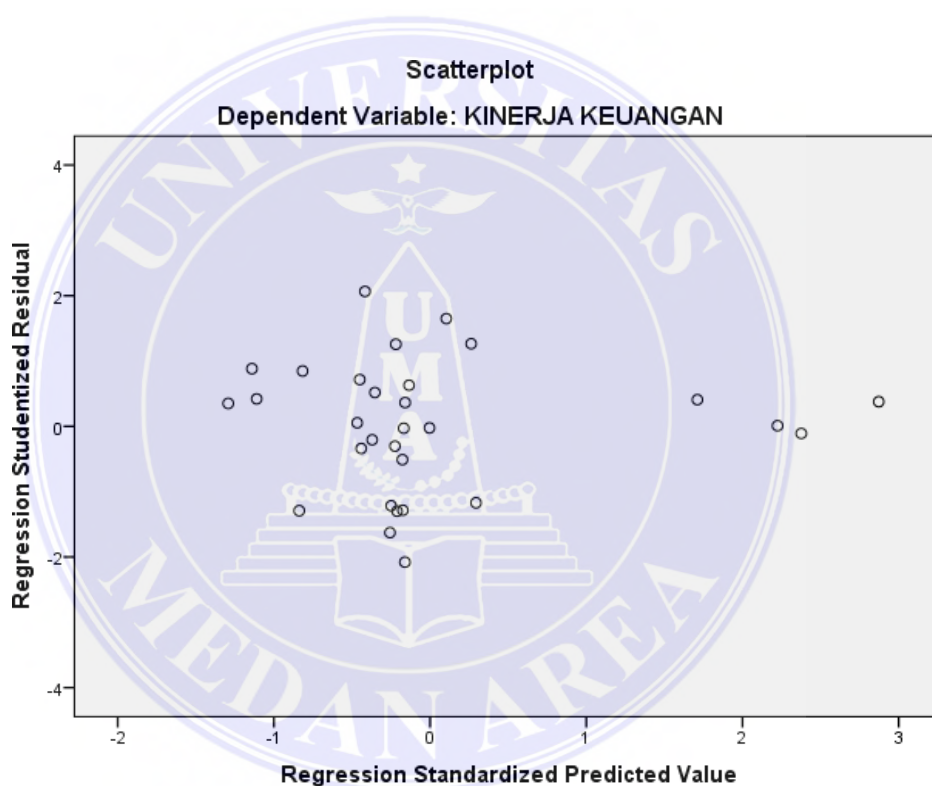
## 2. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.997	1.003
	BELANJA MODAL	.997	1.003

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

## 3. Uji Heteroskedastisitas



## 4. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.559 <sup>a</sup>	.5211	.5152	0.00618	1.334

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD

b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN



## Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.387	27.476		1.288	.209
1 PAD	2.549	.971	.449	2.625	.014
BELANJA MODAL	2.617	.877	.120	2.103	.049

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

## Uji T (Uji Parsial)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.387	27.476		1.288	.209
1 PAD	2.549	.971	.449	2.625	.014
BELANJA MODAL	2.617	.877	.120	2.103	.049

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

## Uji F (Simultan)

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18.892	2	9.446	3.608	.041 <sup>b</sup>
Residual	70.692	27	2.618		
Total	89.584	29			

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD

## Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.459 <sup>a</sup>	.4211	.4152	0.00618

a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL, PAD

b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

### Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus I : Jl. Kualan No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7366168, 7366348, 7366781, Fax (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/B, Setia Budi No. 798 Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax (061) 8226131  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Web: [www.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id) email fakultas\_ekonomi@uma.ac.id

---

Nomor : 1640/FEB/01.1/III/2022 31 Maret 2022  
Lamp :  
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara**

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : AISYAH AULIYA AZ-ZAHRA  
N P M : 178330039  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara ( 2015-2021 )**

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni



Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

### Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No. 6 Telp/Fax: 7863567-7806033  
Medan Kode Pos : 20143  
Website: <http://dinastph.sumutprov.go.id> E-mail: [distan\\_propsu@yahoo.com](mailto:distan_propsu@yahoo.com)

Medan, 04 Agustus 2022

Nomor : 423.4/ /UM /2022  
Sifat :  
Perihal : **Pengembalian Izin Riset**

Kepada  
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

Di -  
Medan.

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area nomor 1640/FEB/01.1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NPM	PRODI/JURUSAN
1.	AISYAH AULIYA AZ-ZAHRA	178330039	AKUNTANSI

Telah selesai melaksanakan Magang atau Riset untuk bahan Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Program Studi S1 AKUNTANSI sudah menyelesaikan dengan baik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan seperlunya.

**AG. PI. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**SEKRETARIS**  
  
**AG. LUSYANTINI, MM**  
**PEMBINA TK.I**  
NIP. 19680705 199303 2 004

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu (sebagai laporan) di Medan  
2. Pertinggal.